



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 149

TAHUN : 1984

SERI : D NO. 147

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 11 TAHUN 1983 TENTANG**

### **POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

#### **DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang : a. bahwa menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah, sebagai Pola Umum Pembangunan Daerah yang merupakan rangkaian Program-program Pembangunan di segala bidang yang berlangsung secara terus menerus untuk dapat mewujudkan tujuan Pembangunan Daerah sebagai termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dan Rencana Induk Pembangunan Regional Bali Tahun 1977 - Tahun 2000 ;
- b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah itu harus memberikan kejelasan arah bagi perjuangan Daerah dan masyarakat yang dewasa ini sedang membangun agar dengan demikian dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu Lima Tahun mendatang dalam rangka kelanjutannya yang berjangka panjang sehingga secara bertahap dapat diwujudkan cita-cita masyarakat ;
- c. bahwa Pokok-pokok penyusunan dan penguangannya haruslah mampu memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan sehingga Pola Dasar Pembangunan Daerah perlu disusun dan dituangkan di dalam Pola Umum Pembangunan secara sistematis dalam kebulatan hubungan yang menyeluruh ;
- d. bahwa oleh karena itu, Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang merupakan landasan bagi Penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Nopember 1978 Nomor : Bangda 1/9/26 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah ;
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI,

#### Pasal 1

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali disusun sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan ;
- b. Bab II Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang ;
- c. Bab III Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat ;
- d. Bab IV P e n u t u p.

#### Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1, terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, materi yang belum tertampung dalam dan tidak bertentangan dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 4

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ini, menjadi landasan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 21 Nopember 1983.

KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI,

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI

ttd.

ttd.

( I GUSTI PUTU RAKA, SH. )

( M A N T R A )

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan  
Nomor : 050.61 - 1026 tanggal : 18 Desember 1984  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali

Nomor : 149 tanggal : 20 Desember Tahun 1984  
Seri : D Nomor : 147

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI,  
NIP. 010023939.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pengertian.

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah suatu Garis Besar Kebijaksanaan dan Arah Pembangunan Daerah sebagai pernyataan kehendak rakyat yang pada hakikatnya adalah suatu Pola Umum Pembangunan Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali dan yang merupakan sub sistem dari Pola Umum Pembangunan Nasional.
2. Pola Umum Pembangunan Daerah tersebut merupakan rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berkesinambungan secara terus menerus.
3. Rangkaian Program-program Pembangunan Daerah yang terus menerus tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan setahap demi setahap dan secara berencana apa yang dicantumkan dalam Tujuan Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran dari Tujuan Nasional seperti termaksud di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan memperhatikan, memanfaatkan dan menggerakkan modal dasar dan faktor-faktor dominan Daerah Bali.
4. Modal Dasar dan Faktor-faktor Dominan.

#### a. Modal Dasar.

Modal Dasar Pembangunan Daerah yang dimiliki oleh rakyat dan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ialah :

- 1). Kemerdekaan dan Kedaulatan Bangsa Indonesia.
- 2). Kedudukan Geografi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali terletak antara Jawa dan Nusa Tenggara sebagai wilayah penghubung dan sebagai salah satu pintu gerbang hubungan internasional, khususnya melalui jalur perhubungan udara dan karenanya Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali mempunyai posisi cukup strategis.
- 3). Sumber-sumber kekayaan alam yang terdapat di daratan dan di lautan memberikan kehidupan penduduk di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di segala bidang.
- 4). Jumlah penduduk yang cukup padat yang mempunyai sifat rajin, tekun, serta memiliki bakat dan ketrampilan khususnya di bidang seni budaya, apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal Pembangunan utama bagi usaha pengembangan di segala bidang.
- 5). Modal rokhaniah dan mental, yaitu kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan tenaga penggerak yang tidak ternilai

harganya bagi pengisian aspirasi bangsa. Juga kepercayaan dan keyakinan bangsa atas kebenaran falsafah Pancasila merupakan modal sikap mental yang dapat membawa bangsa menuju cita-citanya.

- 6). Modal budaya, yakni budaya yang khas bersumber pada agama Hindu yang berakar kuat dalam masyarakat.
- 7). Potensi efektif Daerah yakni segala sesuatu yang bersifat potensial dan produktif yang telah dimiliki oleh Daerah, sepanjang sejarahnya, termasuk kekuatan sosial politik antara lain Parpol dan Golkar, organisasi profesi serta organisasi-organisasi tradisional, seperti Desa Adat, Subak dan organisasi sosial lainnya.
- 8). Stabilitas Daerah yang cukup mantap.

#### b. Faktor-faktor Dominan.

Dalam menggerakkan dan memanfaatkan Modal Dasar Pembangunan untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah dengan landasan serta azas-azas tersebut di atas perlu diperhatikan faktor-faktor dominan tersebut :

- 1). Faktor demografi dan sosial budaya.
  - 2). Faktor geografi, hidrografi, geologi dan topografi.
  - 3). Faktor klimatologi.
  - 4). Faktor flora dan fauna.
  - 5). Faktor kemungkinan pengembangannya.
5. Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, baik dalam waktu 5 tahun berikutnya maupun dalam jangka panjang, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah yang berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, GBHN dan kondisi obyektif Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sendiri itu disusun dan dituangkan di dalam Pola Umum Pembangunan Daerah dengan susunan sistematika sebagai berikut :
- a. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang yang merupakan Garis-garis Besar dan Arah Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 25 - 30 tahun.
  - b. Pola Umum Pelita Keempat Daerah yang merupakan Garis-garis Besar dan arah Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 tahun sebagai penjabaran daripada Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan menjadi landasan penyusunan Repelita IV Daerah.

#### B. Maksud dan Tujuan.

Maksud ditetapkannya Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah untuk memberikan arah bagi pembangunan Daerah dalam ruang lingkup Pembangunan Nasional dengan tujuan, agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun berikutnya dan dalam jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita Bangsa Indonesia, seperti termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945.

## B A B II

### POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG

#### A. Pendahuluan.

1. Berkat Asung Wara Nugraha Ida Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa Pemerintah Daerah bersama-sama rakyat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah dapat melaksanakan Pembangunan Daerah melalui tahapan Pelita I, II dan Pelita III sebagai realisasi perwujudan cita-cita Nasional di Daerah sebagaimana yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yakni suatu masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meskipun berbagai keberhasilan dalam pembangunan telah dicapai, tidaklah perlu cepat-cepat merasa puas karena masih adanya masalah-masalah yang dihadapi seperti masalah kecepatan pertumbuhan penduduk di Daerah, masalah ketenagakerjaan, keterbatasan potensi Daerah dalam arti terbatasnya potensi sumber-sumber alam yang dapat di eksplorir bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah dan adanya problematik dalam bidang sosial budaya sebagai akibat berkembangnya kepariwisataan dan teknologi. Ini berarti Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka panjang akan dihadapkan kepada masalah yang memerlukan penanganan secara berencana dan bertahap melalui serangkaian pembangunan.
3. Agar pelaksanaan Pembangunan Daerah dapat berjalan lancar dan benar-benar terarah dalam mencapai tujuan dan cita-cita Daerah dan dalam rangka mencapai Tujuan Nasional perlu disusun dan ditetapkan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 1969 dengan pelaksanaan Pembangunan Daerah melalui Pelita I, II dan Pelita III yang selanjutnya berkesinambungan melalui Repelita IV Daerah, Repelita V dan seterusnya yang saling sambung menyambung dalam satu kesatuan yang serasi.
4. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang tersebut merupakan Garis-garis Besar dan Arah Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 25 - 30 tahun berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pada bagian-bagian berikutnya dalam Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang ini dijabarkan kekhususan Daerah dengan mengemukakan ciri-ciri Daerah dan kaitannya dengan Repelita Nasional yang berturut-turut diuraikan pada bagian Kondisi dan Potensi Wilayah, Tujuan Pembangunan Daerah dan Arah Pembangunan Daerah.

#### B. Kondisi dan Potensi Wilayah.

##### 1. Kondisi.

##### 1.1. Kondisi Fisik.

##### a. Letak Astronomi.

Propinsi Daerah Tingkat I Bali terletak di antara  $7^{\circ}54'$  dan  $8^{\circ}50'$  Lintang Selatan,  $114^{\circ}25'$  dan  $115^{\circ}42'$  Bujur Timur.

#### b. Letak Maritim.

Propinsi Daerah Tingkat I Bali dikelilingi oleh laut. Di sebelah utara adalah Laut Jawa, di sebelah Selatan adalah Samudra Indonesia, di sebelah Barat adalah Selat Bali dan di sebelah Timur adalah Selat Lombok.

#### c. Letak Ekonomis.

Letak Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah sangat strategis dan menguntungkan, dilihat dari segi ekonominya, karena merupakan penghubung lalu lintas darat dan laut antara pulau-pulau di Nusa Tenggara dengan Jawa, dan juga merupakan Daerah penghubung antara dua benua yaitu Asia dan Australia. Ini berarti perhubungan Laut dan Udara dari Bali ke benua lainnya sangat lancar terutama pada saat sekarang ini Bali memiliki hubungan udara langsung dengan Luar Negeri. Sebagai Daerah Pariwisata maka letak Pulau Bali sangat menguntungkan.

#### d. Relief dan Topografi.

Di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari Barat ke Timur. Sepanjang pegunungan itu terdapat beberapa Gunung yang merupakan puncaknya, yaitu Gunung Merbuk (1.386 m), Gunung Patas (1.414 m), Gunung Watukaru (2.276 m), Gunung Pohen (2.069 m), Gunung Pengilingan (2.098 m), Gunung Batur (1.717 m), Gunung Agung (3.140 m) dan Gunung Seraya (1.174 m). Di antara Gunung-gunung tersebut ada yang berapi yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung.

Di bagian Selatan Pulau Bali terdapat semenanjung Bukit yang tingginya 202 m, sedangkan Pulau Nusa Penida yang merupakan perbukitan kapur dengan puncaknya tertinggi 529 m. Di tengah-tengah terdapat 3 buah danau yaitu Danau Beratan seluas  $\pm$  370 Ha, Danau Buyan seluas  $\pm$  360 Ha dan Danau Tamblingan seluas 110 ha. Di sebelah Timur terdapat Danau Kepundan yaitu Danau Batur dengan luas  $\pm$  1.718,75 Ha. Sebagai akibat dari adanya pegunungan di tengah-tengah maka sungai-sungai yang ada mengalir kedua arah yaitu ke arah Utara sungainya pendek dan ke arah Selatan sungainya lebih panjang. Terdapat dua jenis sungai yaitu sungai permanen yang mengalirkan air sepanjang tahun dan sungai intermitten yang hanya mengalirkan air pada musim hujan. Relief Pulau Bali adalah sebagai berikut :

- 1). Ketinggian Wilayah dari 0 - 100 meter di atas permukaan air laut dengan kemiringan 0 - 2 %.
- 2). Ketinggian wilayah dari 100 - 500 meter di atas permukaan air laut dengan kemiringan 2 - 15 %.
- 3). Ketinggian wilayah dari 500 - 1000 meter di atas permukaan air laut dengan kemiringan 15 - 40 %.
- 4). Ketinggian Wilayah dari 1000 meter ke atas di atas permukaan air laut dengan kemiringan lebih dari 45 %.

#### e. Hidrologi.

Hidrologi dimaksudkan meliputi air permukaan dan air tanah. Keadaan air di dalam tanah berdasarkan kandungan air yang terdapat dalam tanah, sedang air di permukaan adalah air dari sumber mata air, sungai yang mengalir di permukaan tanah, danau-danau dan rawa-rawa. Berdasarkan kandungan air di dalam tanah dibedakan atas :

- 1). Daerah dengan kandungan air cukup besar dengan debit 10 liter per detik.
- 2). Daerah dengan kandungan air sedang dengan debit 5 liter per detik.
- 3). Daerah dengan kandungan air kurang, yaitu dengan debit 1 liter per detik.
- 4). Daerah dengan kandungan air kecil yaitu dengan debit 0,5 liter per detik.
- 5). Daerah dengan kandungan air sangat kecil yaitu dengan debit 0,1 liter per detik.

Di samping itu ada Daerah yang terpengaruh air asin (air laut). Sumber mata air penyebarannya terbanyak di bagian Selatan pegunungan terutama tersebar antara Daerah Kabupaten Tabanan dan Karangasem. Di bagian Utara Pegunungan ada di sekitar jalan raya Bedugul - Singaraja. Berdasarkan penyebaran sumber mata air ini, sungai di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dibedakan dua jenis. Pertama bersifat permanen yang berair sepanjang tahun dan kedua bersifat intermitten yang hanya mengalirkan air pada musim hujan.

#### f. Iklim.

Akibat letak Pulau Bali di Daerah Tropis dan di antara dua Benua serta dua Samudra, iklim Pulau Bali adalah iklim laut tropis yang dipengaruhi oleh angin musim, sehingga memiliki perbedaan musim kemarau dan musim hujan yang tegas dengan diselingi oleh musim pancaroba.

Suhu udara ditentukan oleh ketinggian tempat, tetapi suhu rata-rata di Bali adalah sekitar 28<sup>o</sup> celcius. Dalam pengamatan curah hujan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang dikumpulkan oleh Lembaga Meteorologi dan Geofisika Departemen Perhubungan, terdapat curah hujan rata-rata tahunan tertinggi adalah 3.605 mm (Duda) Kecamatan Selat Karangasem dan curah hujan terendah rata-rata tahunan 963 mm (Sampalan) Kecamatan Nusa Penida Klungkung. Dari data curah hujan di Bali, sesuai dengan klasifikasi dari Schmidt Fergusson maka curah hujan dibedakan atas :

- 1). Daerah yang mempunyai curah hujan rata-rata tahunan kurang dari 1.000 mm.
- 2). Daerah yang mempunyai curah hujan rata-rata tahunan 1.000 - 1.500 mm.

- 3). Daerah yang mempunyai curah hujan rata-rata tahunan 1.500 - 1.750 mm.
- 4). Daerah yang mempunyai curah hujan rata-rata tahunan 1.750 - 2.000 mm.
- 5). Daerah yang mempunyai curah hujan rata-rata tahunan 2.000 - 2.500 mm.
- 6). Daerah yang mempunyai curah hujan rata-rata tahunan lebih besar dari 2.500 mm.

Curah hujan di Bali Utara agak berbeda dengan Bali Selatan, karena letak Bali Utara pada Daerah Bayangan Hujan mengakibatkan curah hujannya lebih kecil dari Bali Selatan.

Dari bulan Desember sampai dengan bulan Pebruari angin bertiup dari Barat dan Barat Laut, sedang pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus angin bertiup dari Timur dan Tenggara. Pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei angin bertiup berubah-ubah arah.

Kelembaban udara di Propinsi Daerah Tingkat I Bali berkisar antara 60 - 90 % yaitu pada musim hujan bisa mencapai 100 % sedangkan pada musim kering bisa mencapai 60 %.

#### g. Tanah.

Jenis tanah sangat erat hubungannya dengan topografi, geologi, iklim dan pola kehidupan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Penyebaran jenis-jenis tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah sebagai berikut : Jenis tanah Litosol yang sangat peka erosi terdapat di bagian Barat pulau membujur dari Barat (Penguinman dan Melaya) ke Timur sampai Kalopaksa, Patemon, Ringdikit dan Pempatan, juga terdapat di sekitar G. Penyau, G. Pintu, G. Juwet dan G. Seraya yang secara keseluruhan meliputi kira-kira seperempat pulau.

Jenis tanah Regosol yang juga sangat peka erosi terdapat di bagian Timur pulau, dari Amlapura sampai Culik. Jenis tanah ini juga terdapat di sepanjang pantai dari Singaraja ke Seririt, Bubunan, Kekeran di sekitar danau-danau Tamblingan, Buyan, dan Beratan, di sekitar kelompok hutan Gunung Watukaru dan sebagian kecil di pantai Selatan Kusamba, Sanur, Benoa dan Kuta.

Jenis tanah Andosol yang peka erosi terdapat di sekitar Baturiti, Candikuning, Banyuatis, Gobleg, Pupuan dan sebagian kelompok hutan G. Watukaru. Jenis tanah Mediteran yang kurang peka erosi terdapat di jazirah Bukit, Nusa Penida dan Kepulauannya.

Jenis tanah Aluvial yang tidak peka erosi terdapat di dataran Negara Sumber Klampok, Manggis, dan Angantelu.

#### h. Tata Guna Tanah 1983.

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1). Tanah Sawah.                 | 100,429,50 ha |
| a). Pengairan setengah tehnik    | 59.523,50 ha. |
| b). Pengairan sederhana P.U.     | 9.743,00 ha.  |
| c). Pengairan sederhana non P.U. | 30.398,00 ha. |

d). Tadah hujan	765,00 ha.	
2). Tanah Kering.		157.148,20 ha
a). Pekarangan	33.637,67 ha.	
b). Tegalan	102.291,50 ha.	
c). Rawa-rawa	257,00 ha.	
d). Tambak	304,00 ha.	
e). Kolam/tebat/empang	122,82 ha.	
f). Tanaman kayu-kayuan	13.433,63 ha.	
g). tanah yang sementara tidak diusahakan	7.101,58 ha.	
3). Hutan Negara		125.513,80 ha
4). Perkebunan		146.140,09 ha
5). Lain - Lain		34.054,41 ha
		<hr/>
Jumlah luas wilayah Bali		563.286,00 ha
		<hr/> <hr/>

#### i. Flora dan Fauna.

Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali terdapat berbagai jenis flora, di Bali Barat (Kabupaten Jembrana, Buleleng) antara lain terdapat : bayur (*pterospERMUM javanicum* jungh), ketangi (*lagerstroemia speciosa* Perr), majagau (*despyros cauliflora* BL), bunut (*ficus strictica* Miq) di Cagar Alam Batukaru (Kabupaten Tabanan) antara lain terdapat : Bunut (*ficus indica* L), sompang (*laplacea* sp), kunyit-kunyit (*elaeocarpus glaber* BL), cemara geseng (*casuarina junghuhniana* Miq), suren (*toona sureni* Merr), cemara pandak (*podocarpus imbricatus* BL). Cagar alam Sangeh (Kabupaten Badung) antara lain terdapat : badung (*garcinia* sp), beringin (*ficus kurzii* King), cempaka kuning (*michelia champaka* L), pala (*dipterocarpus haseltii* Bl).

Di samping itu terdapat beberapa jenis fauna dan di antaranya fauna itu yang paling terkenal adalah banteng (*bos sondaicus*), jalak putih (*leucopsar rotschildi*), dan macan kumbang (*panthera pardus*). Satwa-satwa lainnya terdapat pula antara lain :

— babi hutan (*sus vitatus*), kijang (*muntiacus mancak*), lutung (*presbytis pirus*), rusa (*cervus* sp).

#### j. Mineral dan bahan galian.

Sampai saat ini di Propinsi Daerah Tingkat I Bali belum diketemukan adanya hasil-hasil tambang/galian dan mineral yang berarti.

Potensi Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang merupakan kekayaan alam adalah sebagian besar terdiri dari bahan galian golongan C seperti : batu padas, batu karang bukit, pasir, kerikil serta jenis galian golongan C lainnya.

Bahan-bahan galian dan mineral lainnya seperti bahan galian A dan B sampai sekarang belum diketemukan dan perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam.

## k. Luas Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Luas Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan beberapa pulau kecil-kecil seperti Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan dan Pulau Menjangan mempunyai luas 5.632,86 km<sup>2</sup>.

Luas masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II adalah sebagai berikut :

1). Buleleng	1.320,80 km <sup>2</sup> .
2). Jembrana	841,80 km <sup>2</sup> .
3). Tabanan	863,06 km <sup>2</sup> .
4). Badung	542,50 km <sup>2</sup> .
5). Gianyar	368,00 km <sup>2</sup> .
6). Bangli	520,00 km <sup>2</sup> .
7). Klungkung	315,00 km <sup>2</sup> .
8). Karangasem	861,70 km <sup>2</sup> .
	<hr/>
	5.632,86 km <sup>2</sup> .
	<hr/> <hr/>

## 1.2. Kondisi Sosial.

### a. Penduduk.

Jumlah penduduk Propinsi Daerah Tingkat I Bali berdasarkan hasil sensus tahun 1980 adalah 2.469.724 jiwa, dan luas Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali 5.632,86 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduknya adalah 438 jiwa/km<sup>2</sup>.

Penduduk Propinsi Daerah Tingkat I Bali tersebar secara tidak merata di seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II (8 Kabupaten Daerah Tingkat II) di Bali. Jumlah penduduk masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II pada tahun 1980 adalah sebagai berikut :

1). Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng	486.962 jiwa.
2). Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana	204.915 jiwa.
3). Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan	342.816 jiwa.
4). Kabupaten Daerah Tingkat II Badung	504.300 jiwa.
5). Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar	306.129 jiwa.
6). Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung	148.746 jiwa.
7). Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli	161.542 jiwa.
8). Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem	314.314 jiwa.
	<hr/>
J u m l a h	2.469.742 jiwa.
	<hr/> <hr/>

Di antara 8 Kabupaten Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung mempunyai tingkat kepadatan penduduk paling tinggi yaitu 929 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana merupakan Daerah yang tingkat kepadatan penduduknya paling rendah yaitu 243 jiwa/km<sup>2</sup>.

Tingkat kepadatan penduduk di tiap Kabupaten Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1980 adalah :

1). Kabupaten Daerah Tingkat II Badung	929,6 jiwa/km <sup>2</sup> .
2). Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar	831,9 jiwa/km <sup>2</sup> .
3). Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung	472,2 jiwa/km <sup>2</sup> .
4). Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan	397,2 jiwa/km <sup>2</sup> .
5). Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng	368,7 jiwa/km <sup>2</sup> .
6). Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem	364,8 jiwa/km <sup>2</sup> .
7). Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli	310,7 jiwa/km <sup>2</sup> .
8). Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana	243,4 jiwa/km <sup>2</sup> .

Penduduk Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada tahun 1961 berjumlah 1.782.529 jiwa dan pada tahun 1971 menjadi 2.120.338 jiwa. Ini berarti bahwa tingkat pertumbuhan penduduk antara tahun 1961 sampai dengan tahun 1971 adalah 1,77 % rata-rata setiap tahun.

Kemudian berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilaksanakan pada tahun 1980, jumlah penduduk Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada tahun 1980 adalah : 2.469.724 jiwa. Pertumbuhan penduduk antara tahun 1971 sampai dengan tahun 1980 rata-rata pertahun adalah 1.69 %.

Ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk antara tahun 1961 sampai dengan tahun 1971 dan tahun 1971 sampai dengan tahun 1980 cenderung telah mengalami penurunan. Laju pertumbuhan penduduk tiap Kabupaten di Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada tahun 1961 - 1971 dan 1971 - 1980 adalah sebagai berikut :

	1961 - 1971	1971 - 1980
1). Kabupaten Buleleng	2,27 %	2,08 %
2). Kabupaten Jembrana	2,91 %	1,93 %
3). Kabupaten Tabanan	1,85 %	0,48 %
4). Kabupaten Badung	2,60 %	2,54 %
5). Kabupaten Gianyar	1,58 %	1,32 %
6). Kabupaten Klungkung	0,87 %	0,72 %
7). Kabupaten Bangli	1,11 %	1,70 %
8). Kabupaten Karangasem	0,23 %	1,78 %
Rata - rata	<u>1,77 %</u>	<u>1,69 %</u>

Prosentase penurunan ini disebabkan antara lain oleh keberhasilan Program Keluarga Berencana dan Transmigrasi.

Namun pertambahan penduduk di tahun-tahun mendatang masih tetap tidak dapat dielakkan. Pertambahan penduduk di samping disebabkan oleh tingkat kelahiran, juga disebabkan oleh adanya migrasi penduduk yang datang dari luar Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Keadaan yang demikian menyebabkan adanya pertambahan penduduk yang terus menerus di tahun-tahun mendatang, sedangkan di lain pihak kita dihadapkan akan adanya wadah fisik yang relatif tetap. Hal ini menyebabkan tingkat kepadatan penduduk yang semakin meningkat, dan dengan

semakin meningkatnya tingkat kepadatan penduduk akan cenderung menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi di dalam masyarakat.

## **b. Sosial**

### **1). Agama.**

Sampai akhir Pelita III Pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijaksanaan yang tepat dengan kebijaksanaan peningkatan pembinaan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Dengan kebijaksanaan tersebut telah dicapai kemajuan-kemajuan yang positif dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya.

Karena itu kehidupan keagamaan tersebut sekarang dan seterusnya perlu dibina dengan sebaik-baiknya, sejalan dengan pembinaan sektor-sektor kehidupan lainnya dalam pembangunan.

Berdasarkan prosentase jumlah umat beragama terdapat sebagian besar penduduk Propinsi Daerah Tingkat I Bali beragama Hindu, sedangkan selebihnya terdiri dari Umat Islam, Budha, Kristen Protestan dan Kristen Katolik.

Antar umat beragama telah berlangsung suasana kehidupan yang penuh kerukunan dan dalam hal ini perlu terus dibina dan dimantapkan diwaktu-waktu yang akan datang.

### **2). Kebudayaan.**

Pembangunan kebudayaan bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa yang bernilai luhur, memupuk kepribadian bangsa, meningkatkan ketahanan kebudayaan nasional dalam rangka pembinaan dan pengembangan Wawasan Nusantara dan memperkaya kebudayaan Nasional yang sanggup secara selektif menerima pengaruh-pengaruh kebudayaan asing dan kebudayaan itu sendiri pada hakekatnya menyangkut hampir seluruh aspek kehidupan manusia yang sangat kompleks.

Pembangunan kebudayaan dalam 3 (tiga) masa Pelita telah berhasil mengembangkan dan menumbuhkan kebudayaan sesuai dengan arah yang diharapkan, menumbuhkan dirinya dari sumber-sumbernya sendiri, namun sebaliknya secara selektif dapat menerima unsur-unsur kebudayaan luar yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan kehidupan kebudayaan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Bahwa pembinaan dan pengembangan kebudayaan di Daerah tidak dapat dilepaskan daripada pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional secara keseluruhan, lebih-lebih bila dikaitkan dengan kebijaksanaan pemerintah yang telah menetapkan Propinsi Daerah Tingkat I Bali menjadi Pusat Pariwisata Indonesia Bagian Tengah.

Adapun faktor-faktor yang dominan yang merupakan kondisi

obyektif yang menguntungkan dalam rangka pengembangan kebudayaan di Daerah ialah ; segala aktifitas di bidang ritual ke Agamaan beserta adat istiadatnya yang bersifat tradisional positif tetap dipertahankan dan dipelihara dengan baik serta diharapkan menjadi sumber penggerak keagairahan pembangunan di Daerah, terutama yang mewarnai ciri khas pengembangan Pariwisata di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yaitu Pariwisata Budaya yang berlandaskan kebudayaan Bali yang bersumber kepada Agama Hindu.

### 3). Kesehatan.

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk memperluas kesempatan guna mendapatkan derajat kesehatan yang sebaik-baiknya bagi setiap warga masyarakat sejalan dengan meningkatnya usaha pembangunan. Dalam rangka ini maka pelayanan kesehatan yang lebih merata perlu terus ditingkatkan sehingga tercipta masyarakat yang semakin sehat dan pada gilirannya turut mendukung usaha-usaha pembangunan.

Keadaan kesehatan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali secara umum dapat dikatakan sudah mencapai taraf yang memadai dan perlu dikembangkan ke taraf yang lebih maju. Bidang kesehatan yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut :

- a). Status kesehatan yang berkaitan dengan kecerdasan dan perilaku masyarakat, dalam arti status kesehatan sangat ditentukan oleh tingkat kecerdasan penduduk dan faktor sosial budaya.
- b). Status kesehatan lingkungan.  
Kesehatan lingkungan tersebut menyangkut lingkungan fisik, lingkungan sosial dan biologis perlu mendapat perhatian yang lebih meningkat.
- c). Status kesehatan karena kesakitan dan kematian. Walaupun angka kesakitan untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali menunjukkan angka yang lebih kecil dari angka Nasional yaitu Propinsi Daerah Tingkat I Bali 88/1000 dan Nasional 114/1000, namun demikian status kesehatan karena kesakitan dan kematian perlu mendapat perhatian terus menerus.
- d). Status kesehatan yang menyebabkan cacat : Kecacatan fisik, mental dan gangguan jiwa, akibat kecelakaan lalu lintas, penyalahgunaan obat narkotika dan lain-lain perlu mendapatkan perhatian serius.
- e). Kondisi pelayanan : Pelayanan kesehatan dilakukan lewat jalur Puskesmas, RSUD, Lembaga kesehatan Swasta yang jumlahnya semakin meningkat, pelayanannya sudah semakin baik.

Fasilitas-fasilitas RSUD masih kurang, sehingga penderita dirujuk ke RSUD Sanglah - Denpasar.

f). Peningkatan sarana-sarana penunjang kesehatan perlu lebih mendapat perhatian meliputi antara lain : pembiayaan, ketenagaan, organisasi, obat-obatan, peralatan dan sarana mobilitas.

#### 4). Air Minum Bersih.

Air bersih dirasakan belum memadai, sedangkan kebutuhan makin bertambah. Penyediaan air bersih perlu dipercepat dalam tahapan Repelita IV. Sasarannya ialah peningkatan penyediaan air bersih, terutama penduduk Desa yang berpenghasilan rendah, kepadatan tinggi, mempunyai penyakit akibat pencemaran air, mendesaknya permintaan/kebutuhan air, hingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan sehat. Penggunaan sumber daya alam khususnya air karena tersedianya sangat terbatas, perlu direncanakan dengan seksama, dihemat dan dijaga kelestariannya, serta digalakkan upaya ekstensifikasinya, penambahan dan pengembangan sumber-sumber sarana air bersih yang ada.

Pengelolaan air bersih : Departemen Kesehatan menangani air bersih untuk kelompok penduduk pedesaan, Departemen PU untuk penduduk Ibu Kota Kecamatan (IKK).

Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Desa untuk Daerah Pedesaan secara bertahap telah berpartisipasi untuk lebih meningkatkan penyediaan air bersih melalui APBD dan Swadaya. Sedangkan untuk masyarakat kota dilayani oleh PAM.

#### 5). Perumahan dan Pemukiman.

Dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk di Propinsi Daerah Tingkat I Bali kebutuhan akan perumahan dan areal pemukiman penduduk sangat dirasakan pada dewasa ini. Pembangunan perumahan terutama di pedesaan keadaannya masih banyak yang belum memenuhi persyaratan kesehatan dan lain-lain, sedangkan pembangunan rumah-rumah baru terutama di kota-kota ada kecenderungan memanfaatkan tanah-tanah yang produktif, dan belum sepenuhnya memperhatikan aspek Arsitektur Tradisional Bali.

Dalam masa Repelita III di Daerah Perkotaan dilaksanakan :

- a). Perbaikan lingkungan pemukiman.
- b). Penyediaan tanah untuk pemukiman baru.
- c). Pembangunan rumah-rumah sederhana.

Sedangkan untuk di Daerah pedesaan telah dilaksanakan :

- a). Peningkatan kualitas perumahan.
- b). Penyuluhan dan pemantapan pelaksanaan ketentuan pembangunan perumahan sesuai aspek Arsitektur Tradisional Khas Bali.
- c). Pemberian bantuan perbaikan perumahan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu, pengadaan rumah-rumah contoh.

d). Melaksanakan KIP (Kampung Improvement Program).

Untuk di masa yang akan datang keadaan yang demikian perlu dipertahankan dan ditingkatkan terus.

- a). Pembangunan perumahan dan pemukiman perlu ditingkatkan secara lebih terarah dan terpadu dengan memperhatikan konsepsi Tri Hita Karāna serta memperhatikan unsur-unsur seperti jumlah penduduk dan penyebarannya, tata guna tanah baik di kota dan pedesaan, perluasan kesempatan kerja, kesehatan lingkungan, fasilitas sosial, produksi bahan bangunan setempat tanpa mengabaikan keserasian lingkungan pemukiman pada khususnya dan pada pembangunan Daerah pada umumnya.
- b). Pembangunan perumahan agar ditingkatkan khususnya perumahan dengan harga dapat dijangkau oleh golongan masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah.
- c). Perbaikan lingkungan pemukiman di kota maupun di pedesaan untuk meningkatkan mutu kehidupan golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah perlu makin ditingkatkan dan diperluas, serta pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan perlu makin ditingkatkan.

### c. Politik.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan banyak ditentukan oleh faktor sosial politik di samping faktor-faktor lainnya. Dalam bidang politik, yaitu kesadaran kehidupan berpolitik dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mantap perlu dipupuk dan dibina terus antara lain melalui penguasaan pelaksanaan P-4 demi kelancaran usaha untuk mencapai tujuan Nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan Politik sangat diperlukan untuk lebih mewujudkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila dengan antara lain semakin berkembang lancarnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, peningkatan pendidikan politik dan pemasyarakatan P-4, meningkatnya kemampuan dan tanggung jawab organisasi kekuatan sosial antar masyarakat dan antara masyarakat dengan lembaga Perwakilan maupun dengan lembaga Pemerintahan.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas, termasuk di dalamnya usaha-usaha menciptakan, mengkonsolidasikan dan memanfaatkan kondisi serta situasi untuk dapat lebih meningkatkan suatu budaya politik yang benar-benar demokratis, sistem politik serta situasi dan kondisi yang stabil, efektif dan efisien, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kehidupan yang demikian akan dapat memperkuat sistem konstitusional dalam mewujudkan pemerintah yang kuat, bersih, berkemampuan dan berwibawa dalam rangka mempercepat proses untuk mencapai tujuan pembangunan.

#### d. Kamtibmas.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu syarat mutlak yang harus diciptakan untuk menjamin, memelihara kewibawaan pemerintah dan kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang sedang kita laksanakan, yang sangat erat hubungannya dengan ketahanan nasional yang berdasarkan Pancasila.

Menciptakan situasi yang aman dan tertib dalam masyarakat, adalah kewajiban kita semua sebagai pendukung, pengemban dan pelaksana dari fungsi keadaan yang tertib dan aman. Dalam pelaksanaannya, tugas-tugas tersebut dibebankan kepada POLRI khususnya dan ABRI umumnya, serta aparat-aparat yang lain yang ditugaskan untuk itu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengenai situasi keamanan dan ketertiban di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dapat dinyatakan cukup mantap, namun hal ini perlu dibina dan dipelihara serta ditingkatkan lagi, agar masyarakat merasa betul-betul aman dan lebih bergairah, di dalam mencurahkan perhatian dan tenaganya dalam usaha-usaha pembangunan.

### 1.3. Kondisi Ekonomi.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 1980 dan Product Domestik Regional Bruto tahun 1980, maka kelihatan hubungan antara distribusi penduduk yang bekerja dengan sumbangan sektor pertanian dan non pertanian terhadap penduduk Propinsi Daerah Tingkat I Bali seperti tabel di bawah ini :

#### DISTRIBUSI PENDUDUK DAN PDRB. ( dalam % ).

S e k t o r	Penduduk yang bekerja ( 10 tahun ke atas )	P.D.R.B. ( Harga Konstan 1975 ).
Pertanian	50,74	41,95
Non Pertanian	49,26	58,05
J u m l a h :	100,00	100,00

Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian 50,74 % sedangkan sumbangan sektor ini terhadap pendapatan daerah 41,95 %.

Kalau dilihat dari pemukiman penduduk maka 87 % masih bermukim di pedesaan dan 13 % di daerah kota.

Distribusi pendapatan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun 1981 seperti tabel di bawah ini :

**Persentase Jumlah Pendapatan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.**

Kelompok Pendapatan	Daerah Kota	Daerah Pedesaan	Kota + Pedesaan
40% kelompok pendapatan rendah	20,90	26,45	23,63
40% kelompok pendapatan sedang	35,11	36,72	34,50
20% kelompok pendapatan tinggi	43,99	36,83	41,87
Jumlah :	100,00	100,00	100,00

Memperhatikan ketiga macam data di atas, dan kecenderungan sektor pertanian selama 10 tahun terakhir, maka baik persentase penduduk yang bekerja di sektor ini, maupun persentase sumbangannya terhadap pendapatan Daerah Bali, adalah sama-sama menurun, hanya menurunnya peranan/sumbangan sektor ini lebih cepat.

Ini berarti pertumbuhan sektor non pertanian lebih cepat daripada sektor pertanian. Meskipun demikian, karena 50 % lebih penduduk masih bekerja pada sektor ini, dan 87 % penduduk masih bermukim di pedesaan.

Dari segi pemerataan, Propinsi Daerah Tingkat I Bali termasuk tingkat kepincangan rendah, karena 40 % kelompok pendapatan rendah menikmati 23,63 % pendapatan daerah standard Bank Dunia di atas 17 %).

Karena jumlah lahan pertanian sangat terbatas dan untuk mempertahankan atau memantapkan tingkat pemerataan yang ada, maka kebijaksanaan pembangunan yang akan datang di bidang :

- Kependudukan melalui transmigrasi, Keluarga Berencana dan Kebijakan Kependudukan lainnya.
- Pertanian dalam arti luas dikembangkan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi.
- Industri : Pembinaan dan pengembangan Industri Sedang dan Kecil serta Kerajinan Rakyat.
- Dan usaha jasa-jasa. Usaha jasa ini akan mengikuti kemajuan sektor-sektor lain, terutama pengaruh pengembangan Kepariwisata.

Dari segi pertumbuhan ekonomi, perlu dipikirkan sektor industri terutama industri menengah yang cocok untuk di Propinsi Daerah tingkat I Bali, karena ternyata produktivitas per-tenaga kerja, lebih besar dari industri kecil dan kerajinan, meskipun investasi per-tenaga kerja di sektor padat modal ini jauh lebih besar.

## 2. Potensi.

Dilihat dari segi potensi maka di Propinsi Daerah Tingkat I Bali sampai saat ini belum diketemukan sumber daya alam mineral, sebagai dasar pengembangan pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali belum diketahui potensi bahan tambang dan minyak buminya. Hutan tidak dikembangkan untuk diproduksi. Tetapi berkat kemurahan dan kebesaran Ida Sang Hyang Widhi/Tuhan Yang Maha Esa, maka Bali dianugrahi sistem Sosial Budaya yang menjadi daya tarik para Wisatawan.

Potensi inilah yang menjadi dasar dan akan terus dikembangkan sebagai modal dasar di dalam pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Dengan demikian atas dasar kenyataan obyektif maka potensi Propinsi Daerah Tingkat I Bali dapat digolongkan menjadi 3 sektor, Sektor mana satu sama lain akan sangat kait mengkait satu dengan lainnya.

Adapun sektor-sektor tersebut adalah :

- 2.1. Sektor Dasar : Bidang Sosial Budaya.
- 2.2. Sektor Utama : Bidang Ekonomi.
- 2.3. Sektor Penunjang : Bidang Prasarana/Sarana.

### 2.1. Sektor Dasar :

Kehidupan Sosial Budaya di Propinsi daerah Tingkat I Bali adalah merupakan pencerminan pelaksanaan Agama Hindu yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Kegiatan Agama menyatu dalam kehidupan masyarakat Hindu di Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Ini tercermin dalam setiap aspek kehidupan masyarakat yang menumbuhkan nilai-nilai dalam kehidupan pergaulan, kesenian dan aspek-aspek sosial budaya lainnya. Oleh karena sektor dasar ini akan menjadi landasan bagi setiap program pembangunan yang dilaksanakan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali lebih-lebih dengan ditetapkannya kebijaksanaan oleh Pemerintah Daerah bahwa Kepariwisataaan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah Pariwisata Budaya, dan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ditetapkan sebagai Pusat Pariwisata bagi Indonesia Bagian Tengah.

Sektor Dasar menyangkut beberapa aspek kehidupan sosial budaya yang meliputi kegiatan-kegiatan di sekor :

- a. Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Kesehatan.

#### a. Agama Dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa :

- 1). Penduduk Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagian besar memeluk Agama Hindu. Di samping itu terdapat pula Agama Budha, Kristen, Islam dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sampai saat ini kerukunan kehidupan keagamaan dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berjalan dengan serasi. Keadaan yang demikian ini perlu terus dibina dan dikembangkan sehingga benar-benar terbina Hidup Rukun di antara sesama Umat Beragama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian akan tercipta dan memperkokoh Kesatuan dan Persatuan Bangsa serta peningkatan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

- 2). Dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan maka kehidupan Keagamaan dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin dijamin baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, terutama dalam mengemban tugas bersama untuk membangun Bangsa dan Negara.
- 3). Dalam usaha pengembangan Kehidupan Beragama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka sarana-sarana yang diperlukan akan terus ditingkatkan termasuk pendidikan Agama yang dimasukkan dalam kurikulum di Sekolah-Sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.

#### **b. Pendidikan dan Kebudayaan :**

##### **1). Pendidikan :**

Dalam pembangunan, masalah pendidikan akan merupakan kebutuhan yang sangat vital, karena pembangunan itu sendiri memerlukan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih, di samping memang kebutuhan manusia itu sendiri sebagai akibat berhasilnya pelaksanaan pembangunan.

Oleh karenanya bidang pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi kelanjutan dan kebahagiaan generasi yang akan datang sebagai generasi penerus Bangsa.

Untuk itu diperlukan perencanaan pembangunan pendidikan yang menyeluruh agar mampu menghasilkan manusia yang bertanggung jawab baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Dalam pencapaian tujuan ini pendidikan formal maupun non formal harus terpadu sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat, khususnya menghindari adanya anak-anak wajib belajar yang putus sekolah. Di samping itu sarana dan prasarana sangat menentukan tercapainya tujuan tersebut sehingga perencanaan tidak saja meliputi sistem semata-mata tetapi mencakup di dalamnya penyediaan dana. Berdasarkan hasil yang telah dicapai dalam Pelita-Pelita sebelumnya maka dana di bidang pendidikan perlu diusahakan semakin besar untuk memenuhi perencanaan tersebut.

##### **2). Kebudayaan**

Di dalam pembinaan dan pengembangan Kebudayaan Nasional maka Kebudayaan Daerah adalah sumbernya. Ini sesuai dengan motto Negara Indonesia yaitu : Bhinneka Tunggal Ika.

Justru kebhinnekaan itulah yang mencerminkan adanya unsur-unsur budaya Daerah yang tersebar di seluruh Nusantara ini.

Kebudayaan-kebudayaan Daerah inilah yang harus dan wajib dikembangkan agar benar-benar dapat memberikan aspirasi bagi setiap Warga Negara Indonesia, di dalam pembentukan kepribadian Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila.

Perkembangan kebudayaan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah sejalan dengan penghayatan masyarakat Bali terhadap pengamalan agama Hindu yaitu adanya keseimbangan, keserasian, kelestarian kehidupan dalam tata kemasyarakatan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Sikap hidup yang sedemikian itulah yang menjamin kerukunan hidup antar umat beragama yang ada (Hindu, Islam, Kristen, Budha). Untuk itu di dalam pembinaan pengembangan Kebudayaan Bali harus disesuaikan dengan ajaran-ajaran Agama Hindu. Dalam hubungan ini harus disadari dan diingat bahwa pembinaan dan pengembangan kebudayaan tersebut harus tetap dalam kerangka Falsafah Pancasila, yang telah menjadi pandangan hidup bangsa dan falsafah Negara Indonesia.

Unsur-unsur kebudayaan asing yang tidak sesuai harus dijauhan dan bahkan harus ditolak agar tidak meracuni generasi yang akan datang. Untuk ini harus segera ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menyaring nilai-nilai asing yang masuk sehingga hanya nilai-nilai yang positif saja yang diserap oleh masyarakat Indonesia. Hal yang demikian akan sekaligus merupakan ketahanan masyarakat untuk terus hidup dan berkembang sesuai dengan dinamika dan tujuan masyarakat Indonesia.

### c. Kesehatan.

Bidang kesehatan pada waktu-waktu mendatang akan semakin penting. Ini merupakan hal yang logis sebagai akibat dari berhasilnya pembangunan pada masa-masa sebelumnya Pelita I sampai dengan Pelita III jelas telah menghantarkan bangsa dan Rakyat Indonesia kepada kehidupan yang lebih baik. Keadaan yang demikian akan menimbulkan sikap atau nilai baru bagi masyarakat Indonesia khususnya di bidang kesehatan. Kalau pada Pelita-Pelita sebelumnya Pemerintah mengajarkan apa dan untuk apa kesehatan itu bagi masyarakat, sekarang dan yang akan datang dituntut kepada Pemerintah penyediaan fasilitas-fasilitas kesehatan yang lebih meningkat agar dapat memberi pelayanan yang lebih baik. Peningkatan sarana kesehatan seperti RSU-RSU, Puskesmas-Puskesmas dan lain-lain, penyediaan alat-alat medis dan obat-obatan perlu ditingkatkan untuk tercapainya derajat kesehatan yang optimal di masa mendatang. Di samping itu usaha-usaha preventif seperti keteraturan dan kelestarian lingkungan, penyediaan air bersih baik bagi perkotaan maupun pedesaan, perbaikan gizi, keselamatan dan kesehatan kerja, pengadaan dan pemanfaatan obat-obatan tradisional serta peningkatan status kesehatan masyarakat terutama melalui usaha-usaha pembangunan masyarakat Desa perlu terus dikembangkan di waktu-waktu yang akan datang.

## 2.2. Sektor Utama.

### Bidang Ekonomi Produksi.

Dalam Bidang Ekonomi Produksi terdapat tiga kegiatan pokok yaitu :

- a. Pertanian dalam arti luas.
  - b. Kepariwisataaan yang bermodal dasar kebudayaan Bali yang bersumber pada Agama Hindu.
  - c. Industri dan Kerajinan Rakyat.
- a. **Pertanian dalam arti luas.**

Propinsi Daerah Tingkat I Bali sampai saat ini masih merupakan Daerah dengan struktur ekonomi yang agraris, dimana potensi agraris yang ada relatif terbatas. Pola kegiatan produksi memberikan gambaran yang cukup banyak ragamnya. Di samping produksi pangan sebagai kegiatan pokok terdapat kepariwisataan sebagai sumber pendapatan Daerah yang terkenal.

Sedangkan produksi perkebunan rakyat (cengkeh, panili, kopi, kopra dll), peternakan, perikanan juga menempati kedudukan yang penting dalam pola kegiatan Regional Bali.

Berikut ini diajukan berbagai aspek daripada kegiatan tersebut di atas dengan kemungkinan-kemungkinan perkembangannya di masa depan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

1). **Pertanian Pangan.**

Produksi pangan merupakan sektor usaha yang tradisional. Manajemen tradisional daripada pertanian dalam kombinasi dengan kesuburan tanah secara potensial dapat menjamin pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi penduduk daerah yang cukup tinggi kepadatannya. Untuk meningkatkan hasil produksi pangan (padi, jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan dll.), di daerah tersedia kemungkinan intensifikasi dan diversifikasi. Sedangkan untuk kemungkinan ekstensifikasi sangat terbatas.

2). **Perkebunan.**

Merupakan usaha yang berkembang dan dikembangkan dengan hasilnya yang punya arti penting bagi rakyat maupun daerah. Sektor perkebunan ini akan lebih diarahkan untuk menggarap tanaman yang dapat diexport untuk peningkatan devisa dan peningkatan penghasilan masyarakat.

Sesuai dengan kegiatan pokok yang telah diuraikan di atas maka peningkatan hasil dengan ekstensifikasi akan lebih banyak menghadapi persoalan khususnya yang harus diselesaikan daripada intensifikasi dan diversifikasi.

Hal itu masih perlu diteliti lebih lanjut dalam kaitannya dengan kebijaksanaan yang integral. Berhasilnya peningkatan produksi dan pendapatan di bidang pertanian dalam arti luas akan sangat besar peranannya terhadap perkembangan industri serta perdagangan lokal, antar pulau maupun perdagangan luar Negeri ( export ).

3). **Peternakan.**

Sistem peternakan adalah sistem peternakan rakyat dan umumnya menghasilkan ternak konsumsi dan perdagangan berupa sapi, babi di samping komoditi lainnya.

Mengingat bahwa sebagian hasil yang diperdagangkan keluar Daerah dan dari sektor kegiatan ini terdapat alternatif-alternatif peningkatan hasil dan pengolahan-pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi yang perlu mendapat perhatian lebih serius.

Dalam Pelita IV ini sektor Peternakan kegiatannya akan ditingkatkan khususnya penyediaan bibit yang kualitasnya lebih baik dan secara kuantitatif dapat memenuhi kebutuhan akan protein hewani bagi masyarakat, maupun untuk peningkatkan penghasilan petani, yang antara lain menyediakan bibit sapi Bali dengan kawin suntik adalah cara yang paling tepat dilakukan.

#### 4). Perikanan.

Propinsi Daerah Tingkat I Bali mempunyai potensi sumber daya perikanan yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi sumber produksi perikanan yang bermanfaat di dalam menanggulangi masalah kekurangan protein hewani di kalangan penduduk Bali.

Hal ini terlihat jelas dari adanya berjenis-jenis ikan tawar, laut dan payau. Peningkatan hasil dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi masih sangat memungkinkan di dalam pemenuhan kebutuhan penduduk dan untuk menghasilkan devisa.

#### 5). Kehutanan.

Pada waktu ini luas kawasan hutan  $\pm$  22,19 % dari luas daratan dan belum sesuai dengan luas yang disarutkan dalam segi pertimbangan hidrologi yang baik. Lebih-lebih hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali termasuk hutan lindung.

Untuk mencapai persaratan luas hutan 30 % dari luas Propinsi Daerah Tingkat I Bali, masih perlu diadakan penstrukturan kembali, di samping usaha-usaha reboisasi kawasan hutan itu sendiri. Kegiatan ini adalah sejalan dengan salah satu aspek "Bali menuju Pulau Taman".

Melalui kegiatan tersebut diharapkan terpeliharanya sumber tata air dan kelestarian lingkungan.

#### b. Kepariwisataaan.

Kepariwisataaan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah dirintis sebelum perang Dunia I. Dapat diperkirakan bahwa ada perbedaan pengaruh kepariwisataan antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Pola pengaruh tersebut tidak merata di seluruh Propinsi Daerah Tingkat I Bali, demikian juga di antara masing-masing kehidupan baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan.

Daerah pedesaan yang terkena pengaruh kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepariwisataan terbatas pada kerajinan tangan, pertanian dan tari-tarian sebagai usaha komplementer, sedangkan di kota/tempat tertentu, impact itu adalah dalam bentuk pelayanan (akomo-

dasi, transportasi dan jasa-jasa lainnya).

Untuk itu peningkatan usaha kepariwisataan dipertimbangkan atas dua kemungkinan :

### 1). Intensifikasi.

Pembangunan-pembangunan prasarana dan sarana dan aspek-aspek yang ada yang terkait dan sekarang sedang berlangsung di Daerah Sanur, Kuta, Nusa Dua dan bagian-bagian daerah tertentu lainnya dapat digolongkan kedalam usaha intensifikasi.

Peningkatan prasarana jalan Denpasar-Gilimanuk telah memberikan sumbangan yang berarti di dalam mengintensifikasikan kegunaan prasarana yang sudah ada menunjang kelancaran lalu lintas perekonomian dan kepariwisataan.

Pembangunan prasarana, sarana obyek-obyek kepariwisataan perlu ditingkatkan dan dipertegas secara spesifik dan secara lebih merata di seluruh Bali. Intensifikasi dalam usaha-usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan, antara lain barang kerajinan, produksi pertanian, peternakan, industri, usaha jasa dan lain-lain harus mendapat perhatian lebih meningkat.

Dalam pembangunan usaha-usaha tersebut, perlu para pengrajin, petani, golongan ekonomi lemah dan lain-lain usaha kecil dihimpun dalam satu wadah antara lain dalam usaha bersifat kooperatif.

### 2). Ekstensifikasi.

Peningkatan di bidang kepariwisataan untuk masa waktu yang dekat ini akan lebih menguntungkan pada kegiatan-kegiatan intensifikasi seperti diuraikan di atas daripada penanaman modal di obyek-obyek pariwisata yang baru.

Selanjutnya apabila peningkatan konsentrasi-konsentrasi pada pusat-pusat lama telah berhasil, barulah diadakan perluasan kebagian-bagian daerah lainnya yang dalam hal itu hendaknya dilaksanakan secara sinkron dengan usaha-usaha pembangunan di sektor lain. Usaha pengembangan kepariwisataan jelas membawa efek ganda dalam sektor pembangunan antara lain usaha-usaha pertanian dan khususnya usaha-usaha kerajinan rakyat dan usaha-usaha jasa lainnya.

Usaha industri dan kerajinan rakyat serta usaha-usaha jasa di waktu-waktu yang akan datang atas dasar kondisi obyektif Propinsi Daerah Tingkat I Bali mutlak perlu dikembangkan secara lebih cepat dan tepat dengan tetap membina suasana kekhususan Daerah Bali itu sendiri.

### c. Industri dan Kerajinan Rakyat.

Di samping sektor Pertanian dan Pariwisata maka sektor Industri dan Kerajinan Rakyat memegang peranan yang sangat penting.

Hal ini berdasarkan keadaan obyektif Propinsi Daerah Tingkat I Bali, bahwa potensi kekayaan alam Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagian

besar terdiri dari bahan galian golongan C, sedangkan bahan-bahan lainnya sekarang belum diketemukan. Bila dikaitkan dengan tujuan pembangunan jangka panjang Daerah terutama untuk menjaga kelestarian lingkungan serta Bali menuju Pulau Taman, maka industri kecil dan sedang serta kerajinan adalah tepat untuk dikembangkan.

Hal ini di samping menunjang kegiatan pertanian dan pariwisata, terutama diharapkan untuk penyerapan tenaga kerja yang berlebihan di sektor pertanian sehingga tercapainya peningkatan dan pemerataan bagi masyarakat.

Untuk itu aktivitas industri dan kerajinan yang sudah ada sekarang harus terus didorong dan dikembangkan, seperti kerajinan rumah tangga, produksi bahan bangunan, pakaian jadi, patung dan lain-lain, agar dapat menjadi sektor yang memberikan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Bali.

Potensi kapur di Kecamatan Kuta (Desa Jimbaran) harus segera dimanfaatkan untuk mempercepat proses pembangunan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Ditemukannya geothermal di Desa Candikuning (Bedugul), Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan, pemanfaatannya haruslah memperhatikan faktor-faktor lingkungan serta keserasian alamnya.

Pendekatan sosial dan ekonomis harus berjalan seimbang dan searah. Dengan ditemukannya tenaga panas bumi di Bali tidak mustahil bahwa Bali yang mempunyai keunikan akan memiliki sumber-sumber baku lainnya sebagai penggerak kegiatan Industri.

Untuk itu penelitian akan diteruskan dan dikembangkan dengan lebih memanfaatkan teknologi modern.

### 2.3. Sektor Penunjang.

#### Bidang Prasarana/Sarana.

Kenyataan obyektif menunjukkan bahwa Propinsi Daerah Tingkat I Bali secara kualitatif memiliki potensi yang cukup menonjol di bidang pertanian, pariwisata, industri kerajinan. Potensi ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan potensi ini tergantung kepada pembangunan penyediaan sarana/prasarana yang diarahkan untuk dapat menunjang peningkatan dan pertumbuhan produksi barang dan jasa serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Dalam kaitan dengan penunjang sektor dasar dan sektor utama, maka sektor penunjang Bidang Prasarana/Sarana yang keadaannya semakin meningkat, tetapi masih perlu dilakukan peningkatan untuk selanjutnya, antara lain :

#### a. Pengairan.

Prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pertanian pangan adalah penyediaan sarana irigasi secara berencana dan teratur dengan diikuti usaha-usaha menjaga kelestarian sumber-sumber pengairan.

**b. Perlistrikan.**

Pembangunan perlistrikan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kota serta merangsang kegiatan ekonomi.

**c. Perhubungan.**

Pembangunan prasarana angkutan (darat, laut dan udara) dan perhubungan lainnya ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta manusia keseluruhan daerah, terutama pada daerah-daerah yang terpencil, sehingga bisa menunjang sasaran-sasaran pembangunan dan tersedia pelayanan angkutan yang lebih baik, murah, teratur serta lancar. Sedangkan pembangunan jalan mengutamakan peningkatan kondisi jalan yang sudah ada.

Pembangunan jalan baru dilakukan apabila dapat meningkatkan serta meratakan pembangunan daerah/wilayah terutama jalan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasarannya serta membuka isolasi daerah tersebut.

**d. Pos dan Telekomunikasi.**

Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraannya.

**e. Meteorologi.**

Pembangunan prasarana meteorologi ditujukan untuk menunjang keselamatan pelayaran dan penerbangan serta untuk kepentingan pertanian.

**f. Air Minum.**

Dengan semakin meningkatnya kegiatan industri, penambahan penduduk, maka pencemaran air akan lebih meningkat. Ini berarti kebutuhan akan air bersih akan meningkat pula. Hal ini harus mendapat perhatian dan penanganan yang lebih serius di waktu-waktu mendatang agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu penyediaan air bersih baik untuk perkotaan maupun pedesaan harus mendapat penanganan yang sebaik-baiknya.

**g. Aparatur Pemerintah.**

Melihat kenyataan bahwa pembangunan yang dilaksanakan sampai sekarang ini telah berhasil dengan baik.

Hal ini sangat erat kaitannya dengan aparatur pembangunan itu sendiri, dalam hal ini Aparatur Pemerintah baik Aparatur Pemerintah Daerah maupun Aparatur Pemerintah Pusat yang ada di Daerah, baik Bidang Perencanaan, Pelaksana maupun Pengawas sendiri.

Aparatur Pemerintah sebagai pemeran utama dalam pembangunan, jadi sekaligus merupakan faktor penunjang yang sangat potensial bagi pembangunan itu sendiri.

Dalam hubungan ini kiranya mutlak diperlukan Aparatur yang mempunyai dedikasi penuh kepada Bangsa dan Negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk pembinaan, penyempurnaan dan penertiban Aparatur Pemerintah maupun aparat pendukung lainnya, pendayagunaan aparatur mutlak perlu terus ditingkatkan agar mampu menjadi alat yang berdayaguna dan berhasilguna, bersih serta berwibawa, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

### C. Tujuan Pembangunan Daerah.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa maksud dan tujuan ditetapkannya Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah untuk memberikan arah bagi Pembangunan Daerah dalam ruang lingkup Pembangunan Nasional, jadi merupakan sub sistem dari Pola Dasar Pembangunan Nasional atau merupakan bagian yang integral dari Pembangunan Nasional.

Dengan demikian sudah seharusnya bahwa tujuan Pembangunan Daerah identik dengan tujuan Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata lahiriah dan bathiniah berdasarkan Pancasila yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dan potensi Propinsi Daerah Tingkat I Bali sendiri serta aspirasi masyarakat Bali. Hal ini berarti bahwa dengan terwujudnya tujuan Pembangunan Daerah akan dapat tercapai dua kepentingan sekaligus yaitu kepentingan Daerah dalam kaitannya dengan kepentingan Nasional dalam mengisi Pembangunan Nasional.

Untuk menjamin kesinambungan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali serta tetap dapat tercapainya tujuan Pembangunan Daerah yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin masyarakat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali mutlak perlu dan tetap serta terus dipelihara kelestarian lingkungan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali melalui Pelaksanaan secara bertahap "Bali Menuju Pulau Taman", sebab hanya dengan keadaan lingkungan atau alam yang sesuai dengan kodrat-Nya sajalah umat manusia (baik yang sekarang maupun generasi-generasi seterusnya) akan dapat melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan cita-citanya dengan baik dan sempurna.

### D. Arah Pembangunan Daerah.

1. Sudah merupakan suatu kebijaksanaan Nasional bahwa di dalam rangka Pembangunan kita tidak menghendaki terciptanya suatu hasil pembangunan yang tidak seimbang dalam artian bahwa pembangunan yang dilaksanakan yang pada prinsipnya diperuntukkan bagi umat manusia memberikan suatu hasil pembangunan secara menyeluruh bagi umat manusia sendiri. Dengan demikian pembangunan di sini menghendaki pembangunan manusia lahir dan bathin; tidak hanya pembangunan lahiriah dari kehidupan manusia tetapi juga bathiniahnya, sehingga dengan demikian akan tercipta suatu keseimbangan di antara keduanya sebab pada hakekatnya manusia itu terdiri dari dua bagian yang tidak dapat dipisahkan yaitu lahir dan bathin, untuk itu di antara keduanya perlu ditangani secara bersamaan, seimbang dan serasi.

2. Pembangunan Daerah Jangka Panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila, tidaklah dapat dilaksanakan secara serentak dan dalam tempo yang relatif singkat tetapi haruslah dilaksanakan secara bertahap dan berencana.  
Hal ini erat kaitannya dengan prioritas-prioritas pembangunan serta persediaan dana yang terbatas. Sedangkan tiap-tiap tahapan pembangunan akan merupakan landasan bagi tahapan pembangunan berikutnya sehingga tahapan pembangunan selanjutnya dapat dilaksanakan secara lebih mantap, dengan demikian nantinya dapat diharapkan masyarakat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali tumbuh dan berkembang dengan kekuatannya sendiri.
3. Di dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan akan selalu diusahakan tetap menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi terutama yang diciptakan oleh sektor pertanian dalam arti luas, sektor pariwisata dan sektor industri dan kerajinan rakyat dengan kemajuan religius sosial budaya sehingga menjamin terciptanya manusia Indonesia yang tangguh lahir bathin di dalam menghadapi segala tantangan yang timbul.
4. Kebijaksanaan yang ditempuh dalam periode pembangunan sekarang ini pada pokoknya melanjutkan, memantapkan serta meningkatkan apa yang telah dilaksanakan serta dicapai dalam periode pembangunan sebelumnya yaitu titik berat pembangunan pada masa pembangunan sekarang ini adalah pada sektor pertanian dalam arti luas, sektor pariwisata dan sektor industri kerajinan (khususnya kerajinan rakyat), serta melanjutkan usaha-usaha untuk tetap berswasembada pangan baik untuk memenuhi kebutuhan rakyat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali maupun untuk memenuhi kebutuhan pariwisata serta meningkatkan sektor industri terutama yang terkait erat dengan pengembangan sektor pertanian dan pariwisata.  
Jadi sektor inilah yang pada pokoknya masih tetap merupakan prioritas pembangunan dalam tahapan Repelita IV.

Dengan meningkatnya hasil-hasil yang dicapai oleh bidang ekonomi maka akan tersedianya sumber-sumber pembangunan atau dana-dana pembangunan yang lebih luas guna peningkatan pembangunan di bidang-bidang di luar bidang ekonomi.

Melanjutkan kebijaksanaan pembangunan seperti kebijaksanaan pembangunan sebelumnya adalah erat hubungannya dengan keberhasilan kita dalam sektor-sektor tersebut.

5. Seirama dengan pembangunan dibidang ekonomi maka pembangunan di luar bidang ekonomi perlu pula digalakkan dan ditingkatkan apalagi terhadap sektor-sektor yang mendukung bahkan terkait erat dengan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan di bidang ekonomi tersebut.

Kiranya sektor di luar bidang ekonomi yang utama digalakkan adalah di sektor kebudayaan terutama sangat berkait dengan pengembangan kepariwisataan yang dilandasi kebudayaan yang bersumber pada Agama Hindu.  
Dengan demikian nantinya bentuk-bentuk kebudayaan yang hidup, tumbuh dan berkembang adalah betul-betul mencerminkan pribadi Indonesia yang telah memiliki falsafah hidup yang sangat luhur yaitu Pancasila.

Hal ini mutlak perlu dilaksanakan guna mengimbangi kemajuan yang tercipta sekarang ini akibat keberhasilan pembangunan terutama pada bidang ekonomi dan teknologi yang pada dasarnya lebih banyak bersifat material sehingga memberikan kemakmuran, perlu diimbangi dengan pembangunan mental spiritual, sehingga manusia Indonesia yang karena keberhasilannya di dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak menjadi manusia yang selalu lebih mementingkan kemakmuran material.

Hal yang demikian itu tentu tidak seimbang, sebab itu perlu diimbangi dengan pembangunan yang sifatnya non fisik misalnya pembangunan di sektor sosial budaya, agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan sektor kesejahteraan lainnya.

6. Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah haruslah berjalan bersama-sama dengan pembinaan dan pemeliharaan stabilitas keamanan Daerah sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan yang berarti sehingga pada akhirnya segala hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati seoptimal mungkin oleh masyarakat.

Dalam hubungan ini peranan pemantapan kesadaran kehidupan berpolitik dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara di Propinsi Daerah Tingkat I Bali mutlak perlu dikembangkan terus, di samping itu perlu juga ditingkatkan kesadaran masyarakat akan arti pembangunan, partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat terhadap pembangunan baik dalam memikul beban maupun tanggung jawab serta pengorbanan atas pelaksanaan pembangunan maupun akan hasil pembangunan itu sendiri, ataupun menerima kembali hasil pembangunan yang telah sukses pelaksanaannya.

7. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan Daerah akan dapat memberikan hasil yang semaksimal mungkin dengan memanfaatkan dana yang tersedia secara berdayaguna (hal ini disebabkan keterbatasan dana yang tersedia) sehingga dapat memberikan tidak saja peningkatan pendapatan penduduk di Propinsi Daerah Tingkat I Bali (yang dari tahun ke tahun terus menunjukkan gejala kenaikan) tetapi juga secara bersamaan dapat sekaligus memberikan suatu pembagian pendapatan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan asas keadilan sosial.

Sehingga pelaksanaan pembangunan Daerah yang pada satu pihak bertujuan untuk meningkatkan produksi atau meningkatkan pendapatan perorang, juga sekaligus di pihak lain memeratakan penyebaran hasil-hasilnya kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan demikian akan dapat dicegah melebarnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin di kalangan masyarakat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pelaksanaan Pembangunan Daerah nantinya tidak saja hanya memberikan suatu kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakatnya, tetapi juga sekaligus menciptakan keadilan dalam kemakmuran tersebut, sehingga cita-cita sila kelima dari Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia dapat terwujud secara bertahap.

8. Selanjutnya untuk lebih memudahkan pelaksanaan pembangunan Daerah serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasarannya, dengan memperhatikan kondisi dan potensi di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang tidak sama antara satu Daerah/Kabupaten dengan Daerah/Kabupaten lainnya kiranya titik berat pelaksanaan pembangunan di Daerah Bali tidaklah mutlak harus sama untuk seluruh Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebab hal ini bisa menyebabkan pemborosan dana, untuk itu telah dan akan terus ditempuh strategi pembangunan Daerah yang sudah dilaksanakan selama ini, sebab sudah dapat memberikan hasil-hasil yang cukup memuaskan.
9. Strategi Pembangunan Daerah Bali erat kaitannya dengan strategi Pembangunan Regional Daerah Bali yang berlandaskan pada dominasi aktivitas yang ada dan yang akan dikembangkan, maka Wilayah-wilayah Pembangunan disusun sebagai berikut :
  - a. Wilayah Pembangunan Bali Timur yang meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem, Bangli dan Klungkung dengan pusat pertumbuhannya di Klungkung dengan dominasi aktivitas :
    - 1) Pertanian tanaman pangan dan peternakan.
    - 2) Proteksi lingkungan untuk menciptakan Daerah Kebudayaan yang asli dan lestari sehingga tetap memiliki daya tarik bagi sektor pariwisata.
    - 3) Industri dan kerajinan rakyat.
    - 4) Pariwisata.
  - b. Wilayah Pembangunan Bali Tengah meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan Gianyar dengan pusat pertumbuhannya di Denpasar dengan dominasi aktivitas :
    - 1) Pertanian tanaman pangan.
    - 2) Kepariwisataaan.
    - 3) Industri dan kerajinan rakyat serta pengolahan bahan makanan.
    - 4) Perdagangan.
    - 5) Proteksi lingkungan sehingga tetap dapat memperlihatkan citra asli Pulau Bali dan penduduk Bali.
  - c. Wilayah Pembangunan Bali Barat meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dan Jembrana dengan pusat pertumbuhannya di Negara dengan dominasi aktivitas :
    - 1) Pertanian tanaman pangan dan perkebunan.
    - 2) P e r i k a n a n.
    - 3) Industri dan kerajinan rakyat (khususnya pengolahan hasil pertanian dan perikanan dan hasil-hasil lainnya).
    - 4) P a r i w i s a t a.
  - d. Wilayah Pembangunan Bali Utara meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dengan pusat pertumbuhannya di Singaraja, dengan dominasi aktivitas :

- 1) Pertanian tanaman pangan dan perkebunan,
  - 2) Industri sedang (khususnya pengolahan hasil pertanian dan hasil lainnya),
  - 3) P e r d a g a n g a n ,
  - 4) P a r i w i s a t a .
10. Selanjutnya untuk lebih pemeratakan serta menyelaraskan pembangunan di setiap Wilayah Pembangunan dikaitkan dengan Strategi Pembangunan Regional maka ditetapkanlah adanya Sub-sub Wilayah Pembangunan seperti antara lain :
- a. Sub Wilayah Pembangunan Daerah Kritis,
  - b. Sub Wilayah Pembangunan Sentra-Sentra Industri,
  - c. Sub Wilayah Pembangunan Sentra-Sentra Produksi,
  - d. Sub Wilayah Pembangunan Pariwisata,
- yang masing-masing disesuaikan dengan ciri khusus ataupun kondisi dan potensi khusus Daerah itu sendiri.

#### **E. Catatan Dasar.**

Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang ini adalah merupakan ladsan pokok bagi penyusunan Pola Umum Pembangunan Jangka Menengah yaitu Pola Umum Pelita IV yang merupakan dasar bagi penyusunan Repelita IV Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### BAB III

## POLA UMUM PELITA KEEMPAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

### A. Pendahuluan.

1. Dalam Pelita Ketiga Daerah telah dicapai hasil-hasil yang positif, sehingga tercapilah keadaan yang mantap untuk melanjutkan pembangunan dalam Pelita Keempat sebagai pelaksanaan tahap keempat dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang.
2. Dengan melihat hasil-hasil pembangunan dalam pelaksanaan Pelita Ketiga serta belajar dari pengalaman-pengalaman berharga dalam tiga Pelita yang telah dilaksanakan maka Pemerintah Daerah beserta rakyat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai bagian dari Bangsa Indonesia bertekad untuk mempercepat tercapainya sasaran pembangunan jangka panjang sebagaimana ditetapkan dalam Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang.
3. Dalam Pelita Keempat Daerah harus diusahakan agar pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dapat menunjang terciptanya kerangka landasan bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang terus, untuk kemudian dimantapkan landasan tersebut dalam Pelita Kelima, sehingga dalam Pelita Keenam nanti Bangsa Indonesia sudah benar-benar dapat tinggal landas untuk memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang kita cita-citakan, ialah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
4. Dalam Pelita Keempat ini, sebagai kelanjutan dan peningkatan dari Pelita Ketiga, akan diperluas kegiatan-kegiatan pembangunan di berbagai bidang dan akan diberikan perhatian yang lebih meningkat kepada permasalahan kesejahteraan dengan berlandaskan pada Trilogi Pembangunan yaitu : pemerataan, laju pertumbuhan yang cukup tinggi, dan stabilitas daerah yang sehat dan dinamis, dengan melaksanakan 8 sukses dan 8 Jalur Pemerataan Pembangunannya. Demikian pula halnya dengan berbagai bidang lainnya atau masalah lain yang dalam Pelita Ketiga belum dapat sepenuhnya dipecahkan seperti peningkatan laju pembangunan ekonomi di Daerah-Daerah tertentu di Bali, peningkatan kemampuan yang lebih cepat bagi golongan ekonomi lemah, pengembangan Koperasi, perhatian yang lebih besar kepada golongan miskin, Daerah-Daerah kritis, dan lain-lainnya.
5. Dalam Pelita Keempat dilanjutkan kebijaksanaan pembangunan yang berlandaskan pada Trilogi Pembangunan, ialah : pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.  
Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut saling kait mengkait dan perlu tetap dikembangkan secara serasi agar saling memperkuat.
6. Pelita Keempat meliputi jangka waktu 1 April 1984 sampai dengan 31 Maret 1989.

## B. Tujuan.

Sebagaimana halnya setiap tahap pembangunan dalam rangka pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang, maka tujuan Pelita Keempat ialah :

- Pertama : meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil.
- Kedua : Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

## C. Prioritas Pembangunan Daerah.

1. Sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang, maka dalam Pelita Keempat prioritas diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian dalam arti luas terutama untuk melanjutkan usaha-usaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan sektor pariwisata yang bermodal dasar Kebudayaan Bali yang bersumber pada Agama Hindu, serta sektor industri dan kerajinan terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian dan sektor pariwisata itu sendiri.
2. Sejalan dengan prioritas pada pembangunan bidang ekonomi tersebut, maka pembangunan dalam bidang sosial budaya, politik dan lain-lain makin ditingkatkan sepadan dan agar saling menunjang dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam pembangunan bidang ekonomi.

## D. Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan.

### U m u m .

1. Dalam Pelita Keempat Daerah arah dan kebijaksanaan pembangunan yang ditempuh selama Pelita Ketiga perlu dilanjutkan dan ditingkatkan agar makin nyata dapat dirasakan peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan yang makin merata dan adil bagi seluruh rakyat dan dengan demikian makin memperkokoh Ketahanan Nasional.
2. Stabilitas Daerah merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan keberhasilannya pelaksanaan pembangunan Daerah. Oleh karena itu haruslah diusahakan untuk memelihara dan mengembangkan stabilitas Daerah yang sehat dan dinamis, baik stabilitas di bidang politik maupun di bidang ekonomi.
3. Untuk memantapkan stabilitas di bidang politik haruslah diusahakan makin kokohnya persatuan dan kesatuan Pemerintah Daerah beserta rakyat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali serta makin tegak tumbuhnya kehidupan yang konstitusional, demokratis, berdasarkan hukum dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka ini dan demi kelestarian dan pengamalan Pancasila bagi lembaga/bagi organisasi sosial kemasyarakatan terutama kekuatan sosial politik (Purpol dan Golkar) hanya berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas. Di samping itu harus makin digalakkan usaha memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ( P-4 ) yang dalam Pelita Ketiga telah dilaksanakan dengan hasil-hasil yang positif.  
Usaha-usaha ini merupakan bagian dari langkah-langkah pembangunan di bidang politik.

4. Selanjutnya perlu ditingkatkan usaha untuk memelihara ketertiban dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat, sebagai salah satu syarat bagi terciptanya stabilitas Daerah dalam ruang lingkup Nasional yang mantap. Untuk itu perlu ditingkatkan langkah-langkah pembinaan aparatur pemerintah pada umumnya dan aparatur penegak hukum pada khususnya, untuk meningkatkan kemampuan dan kewibawaannya, di samping memperluas usaha pembinaan kesadaran hukum pada masyarakat pada umumnya. Usaha-usaha ini akan mendorong makin berkembangnya kreativitas masyarakat, meningkatkan kegairahan hidup dan memperluas partisipasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Arah pembangunan Daerah dalam tahap pembangunan ini adalah usaha dalam rangka realisasi secara bertahap arah Pembangunan Nasional jangka panjang yang bersasaran pada terciptanya landasan yang kuat bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila, sedang titik berat dalam pembangunan jangka panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan bidang pertanian dan bidang industri, sedangkan pembangunan di luar bidang ekonomi tersebut dilaksanakan seirama dan serasi dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi. Dengan peningkatan hasil dalam bidang ekonomi maka tersedianya sumber pembangunan yang lebih luas bagi peningkatan pembangunan di bidang sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.
6. Pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi harus dilanjutkan bahkan ditingkatkan daripada sebelumnya. Peningkatan pembangunan ekonomi berarti bertambahnya produksi barang dan jasa dengan laju pertumbuhan yang lebih cepat. Dalam hubungannya ini pengembangan bidang pertanian dan kepariwisataan termasuk pembangunan prasarana dasar dan sarana penunjangnya dalam tahapan pembangunan ini harus diteruskan dan diperluas.
7. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi harus dapat dicapai kenaikan produksi dan jasa di berbagai sektor pembangunan ekonomi yang meliputi sektor-sektor pertanian, pariwisata, industri, prasarana dan lain-lainnya dengan tetap berorientasi pada perluasan kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan produksi tenaga kerja, dan juga meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Usaha-usaha mempercepat laju pembangunan perlu didukung oleh peningkatan kemampuan teknologi di samping peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pembangunan lainnya. Oleh karena itu akan dilanjutkan dan ditingkatkan pengembangan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dilanjutkan usaha pengembangan teknologi guna mendukung pembangunan dalam tahapan yang akan datang.
8. Pembangunan sektor pertanian dalam arti luas perlu terus ditingkatkan melalui usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi, bukan saja dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pertanian yang sangat penting guna memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan sebagian besar rakyat, juga dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat rakyat pedesaan serta untuk menjadikan sektor pertanian semakin kuat guna mendukung perkembangan industri.

9. Pembangunan industri akan makin ditingkatkan dan pertumbuhannya lebih dipercepat, dalam rangka mempercepat terciptanya struktur ekonomi yang lebih seimbang. Di samping itu pembangunan industri harus makin diarahkan pada usaha memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor.
10. Kebijakan pengembangan perdagangan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan antar pulau dan antar negara dalam rangka lebih memperlancar arus barang dan jasa, sehingga tercipta keadaan dan perkembangan harga yang layak dan bersaing dalam rangka menunjang usaha peningkatan produksi dan ekspor, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan rakyat, serta peman-tapan stabilitasi ekonomi Daerah.
11. Untuk pembiayaan Pelita Keempat Daerah diperlukan pembiayaan yang memadai. Karena pembangunan itu semakin meningkat, maka diperlukan usaha-usaha untuk semakin meningkatkan dana-dana pembangunan baik melalui peningkatan penerimaan Daerah (Perpajakan Daerah), penanaman modal sektor Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten), perkreditan, swadaya masyarakat. Dalam hubungan ini sistem perpajakan perlu disempurnakan agar kegiatan ekonomi semakin berkembang. Dengan demikian kemampuan Daerah dan masyarakat untuk membiayai pembangunan dari sumber-sumber daerah sendiri semakin meningkat, dan pembagian beban pembangunan antara golongan yang berpendapatan tinggi dan golongan yang berpendapatan rendah semakin sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Di samping itu sistem perpajakan harus pula dapat membantu menciptakan pola hidup sederhana, yang sangat penting untuk memperkokoh solidaritas sosial. Segala pajak harus didasarkan atas peraturan perundangan. Untuk itu dipergunakan aparat perpajakan yang mampu dan bersih.
12. Di samping sumber pembiayaan tersebut di atas perlu pula ditingkatkan usaha untuk meningkatkan pendapatan devisa melalui ekspor dan pariwisata. Untuk itu perlu diperluas pasaran dan ditingkatkan daya saing barang-barang ekspor dengan jalan meningkatkan efisiensi produksi, memperbaiki mutu barang, memperlancar angkutan, menyediakan fasilitas perkreditan dengan syarat-syarat yang memadai dan sebagainya.
13. Penanaman modal asing di Daerah dimungkinkan di sektor-sektor tertentu yang menghasilkan barang-barang yang sangat kita perlukan, dapat memperluas ekspor, memerlukan modal investasi yang besar dan teknologi yang cukup tinggi, serta tidak akan menghambat perkembangan Perusahaan Nasional. Penanaman modal asing dilaksanakan dalam bentuk usaha patungan dan disertai dengan syarat-syarat untuk membuka kesempatan kerja yang cukup besar, memungkinkan pengalihan ketrampilan dan teknologi kepada Bangsa Indonesia dalam waktu yang secepatnya dan memelihara mutu dan tata lingkungan.
14. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan memanfaatkan jumlah penduduk yang besar sebagai kekuatan pembangunan bangsa maka perlu ditingkatkan usaha-usaha pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya manusia dengan meningkatkan pembangunan di berbagai sektor antara lain dengan mengutamakan pembangunan yang meningkatkan perluasan lapangan

kerja, meningkatkan pengadaan pangan dan mutu gizi, memperluas fasilitas dan memperbaiki mutu pendidikan dan latihan kerja serta meningkatkan pelayanan kesehatan. Dengan usaha-usaha tersebut diharapkan dapat tercipta manusia-manusia pembangunan yang tangguh, berbudi luhur, cakap, trampil, percaya pada diri sendiri dan bersemangat pembangunan.

15. Perluasan kesempatan kerja dalam Pelita IV Daerah merupakan kebutuhan yang semakin mendesak, sehingga perlu lebih dimantapkan dan ditingkatkan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu untuk mendorong perluasan kesempatan kerja seperti pendidikan ketrampilan, pendidikan yang dapat menciptakan lapangan kerja, pembangunan pertanian, pembangunan industri, pembangunan perhubungan, pembangunan pariwisata, pembangunan perdagangan, penentuan skala prioritas investasi, pemilihan teknologi tepat guna program-program bantuan pembangunan, proyek padat karya dan lain-lain yang kesemuanya ini ditujukan untuk memperluas lapangan kerja baru sepadan dengan pertambahan angkatan kerja serta mengurangi pengangguran, dengan lebih mempercepat laju pertumbuhan lapangan kerja khususnya di luar sektor pertanian.
16. Dalam rangka perluasan kesempatan kerja, serta dalam rangka pemecahan masalah kependudukan, maka pemindahan penduduk dari Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang kelebihan tenaga kerja melalui program transmigrasi perlu dilanjutkan dan ditingkatkan.
17. Penggunaan teknologi yang padat karya, yang mudah diserap, diterapkan dan dipelihara serta sejauh mungkin menggunakan bahan-bahan dalam negeri, ini penting peranannya dalam mewujudkan sasaran-sasaran peningkatan hasil produksi, perluasan kesempatan kerja dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
18. Dalam rangka meratakan hasil-hasil pembangunan, perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan Daerah pedesaan yang lebih diarahkan kepada perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan pengembangan lingkungan pemukiman pedesaan dan perkotaan yang sehat, serta peningkatan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam dan menanggulangi masalah-masalah yang mendesak. Dalam hubungan ini berbagai kebijaksanaan dan program pembangunan sektoral perlu lebih diserasikan dengan potensi dan permasalahan yang ada, demikian pula program-program Inpres terus dilanjutkan dan diperluas serta disempurnakan pelaksanaannya.  
Yang perlu mendapat perhatian secara khusus adalah Daerah-Daerah Minus dan Daerah-Daerah yang penduduknya padat agar dapat membendung/mengurangi derasnya arus urbanisasi.
19. Dalam pelaksanaan pembangunan perlu lebih ditingkatkan dan diperluas usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki taraf hidup kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dengan penghasilan yang masih rendah, seperti buruh tani, petani penggarap yang tidak memiliki tanah, petani pemilik tanah yang sangat kecil, nelayan, pengerajin, pengusaha kecil dan sebagainya dengan memberikan kesempatan untuk memperluas dan meningkatkan usahanya dengan jalan memperkuat permodalan melalui pemberian kredit, meningkatkan keahlian dan kemampuan, serta memperluas pemasaran sehingga tercapai pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil yang semakin merata.

20. Pembinaan dunia usaha termasuk Koperasi diarahkan agar mampu memegang peranan sebagai tulang punggung perekonomian Daerah dalam rangka pengembangan ekonomi Daerah yang sehat yang sekaligus menciptakan pemerataan kesejahteraan rakyat, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan ketahanan Daerah dalam ruang lingkup Nasional. Dalam hubungan ini perlu diciptakan iklim dan tata hubungan yang mendorong terciptanya kondisi yang saling menunjang antara usaha Daerah, Koperasi dan swasta.
21. Pengolahan sumber alam dan lingkungan hidup diarahkan agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, dengan tetap memelihara keseimbangan dan kelestariannya, sehingga akan tetap bermanfaat bagi generasi-generasi mendatang, lebih-lebih dalam rangka "Bali menuju Pulau Taman" (Bali yang indah dan lestari) maka usaha rehabilitasi serta pengembalian pada fungsi yang seharusnya dari sumber-sumber alam dan lingkungan hidup yang mengalami kemunduran maupun kerusakan perlu dilanjutkan dan lebih ditingkatkan.
22. Pemanfaatan tanah harus sungguh-sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan tanah maka perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan penataan/perencanaan penggunaan tanah.
23. Dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk dan menciptakan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera maka program keluarga berencana yang telah menunjukkan hasil-hasilnya yang positif perlu diperluas, diintensifkan dan dipercepat pelaksanaannya. Demikian pula makin ditingkatkan dan diperluas kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat menunjang pelaksanaan program keluarga berencana.
24. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berwatak sosial harus makin dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial. Peranan Koperasi yang telah berhasil dikembangkan, perlu lebih didorong dan ditingkatkan untuk makin memegang peranan utama di dalam kehidupan ekonomi di pedesaan khususnya di sektor pertanian. Selanjutnya peranan Koperasi juga makin dikembangkan di sektor-sektor lainnya seperti industri, perdagangan, angkutan dan lain-lain. Usaha-usaha tersebut harus disertai pembinaan agar kegiatan Koperasi dan peranan anggota koperasi makin meningkat sehingga manfaat koperasi makin dinikmati oleh anggotanya, dan peranan Koperasi di dalam meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat menjadi makin besar. Dalam melaksanakan pembinaan Koperasi diutamakan Koperasi-koperasi Unit Desa dan Koperasi Primer lainnya.
25. Pertumbuhan ekonomi sebagai hasil pembangunan ekonomi harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata, di samping itu pertumbuhan ekonomi harus dapat meningkatkan kemampuan daerah dan masyarakat Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk memperluas tersedianya sarana sosial budaya antara lain di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, kesehatan, sosial, agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kebudayaan, olah raga, perumahan, pembinaan generasi muda, peningkatan peranan wanita, pe-

ngembangan lingkungan hidup serta sumber alam dan sebagainya. Dengan demikian pembangunan dalam Pelita Keempat Daerah makin meningkat dan merata pula kesejahteraan rakyat yang mana diharapkan dapat memperkecil jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian pula rakyat akan semakin sadar akan arti dan manfaat pembangunan, yang merupakan modal dan lebih meningkatkan partisipasinya untuk melanjutkan pembangunan tahap-tahap berikutnya.

26. Dengan makin meningkat dan kompleknya pembangunan perlu makin ditingkatkan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan yang dilandasi oleh disiplin dan semangat pembangunan yang tinggi sehingga benar-benar dapat mencapai tujuan pembangunan dengan efektif dan efisien. Untuk itu penyempurnaan aparatur pemerintahan dan aparatur pembangunan harus makin ditingkatkan.
27. Dengan makin meningkat dan meluasnya pembangunan maka makin meningkat dan merata pula kesejahteraan rakyat, dan diharapkan dalam Pelita Keempat akan tercipta kerangka landasan bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri. Hal ini akan makin meningkat kemampuan rakyat untuk membangun serta makin memperbesar kesadaran rakyat akan arti dan manfaat pembangunan, sehingga memperkuar tekad rakyat untuk memacu pembangunan menuju terwujudnya cita-cita kemerdekaan ialah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
28. Untuk menciptakan pembangunan yang terpadu dan seimbang baik antar sektor maupun antar Daerah perlu dilanjutkan kebijaksanaan pengembangan wilayah (regionalisasi) untuk melengkapi pendekatan sektoral yang sudah dianut sebelumnya.
29. Dalam strategi pengembangan regional melalui regionalisasi, diidentifikasi sejumlah Wilayah-wilayah Pembangunan dengan Pusat-Pusat Pertumbuhannya dalam suatu rangkaian hirarki tata ruang Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
30. Guna mempercepat pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan Daerah maka perkembangan dan pembangunan Daerah melalui penciptaan pertumbuhan yang seimbang dan harmonis antara wilayah-wilayah pembangunan beserta pusat-pusat pertumbuhannya dan antara pusat-pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya perlu dilanjutkan dan diperluas dengan penyusunan dan pengembangan sub-sub wilayah pembangunan antara lain pengembangan daerah kritis, pengembangan daerah-daerah centra produksi pertanian dan industri, pengembangan daerah-daerah pariwisata, serta pengembangan pusat pengembangan pedesaan guna mewujudkan keseimbangan antara Daerah Perkotaan dan Daerah Pedesaan.

## E. Sasaran Pembangunan.

### 1. Pertanian & Pengairan.

#### 1.1. Pertanian.

##### a. Pertanian Pangan.

Pertambahan penduduk yang terus menerus dan dihadapkan pada

wadah fisik yang tetap menyebabkan kepadatan penduduk yang makin meningkat. Kepadatan penduduk akan mengundang berbagai masalah dalam bidang pertanian. Penggunaan tanah pertanian untuk pemukiman dan pembangunan-pembangunan lainnya merupakan gejala semakin berkurangnya areal tanah pertanian. Luas tanah garapan perkapita dalam usaha tani cenderung semakin kecil sehingga masalah peningkatan pendapatan petani melalui peningkatan produksi pertanian serta penganekaragaman produksi perlu ditingkatkan.

Peningkatan produksi tanaman pangan bukan saja untuk pemenuhan kebutuhan daerah juga untuk memenuhi kebutuhan Nasional. Intensifikasi tetap merupakan usaha pokok dalam peningkatan produksi di samping usaha-usaha diversifikasi dalam rangka adanya keseimbangan produksi pangan dan palawija melalui pola tanam akan dimungkinkan peningkatan areal dan produksi palawija. Untuk mengurangi tingkat kehilangan produksi akan dikembangkan usaha/kegiatan penanganan selama pasca panen. Walaupun kecil kemungkinan melaksanakan usaha extensifikasi areal usaha tersebut akan tetap dilaksanakan untuk lebih dapatnya peningkatan produksi. Usaha rehabilitasi tanah-tanah kritis antara lain melalui reboisasi dan penghijauan terus dilanjutkan untuk peningkatan areal pertanian dan pencegahan timbulnya tanah kritis baru.

#### **b. Perkebunan.**

Usaha-usaha dalam perkebunan bertujuan untuk membuka kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya, meningkatkan komoditi export non migas serta sebagai bahan baku bagi agro industri yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan petani.

Untuk dapat meningkatkan produksi perkebunan akan diusahakan melalui intensifikasi dan penerapan teknologi pada tanaman perkebunan tradisional dengan bibit unggul. Usaha-usaha intensifikasi dan extensifikasi areal tanaman perkebunan yang nilai ekonomisnya tinggi seperti cengkeh, panili dan jambu mente dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian alam di samping usaha diversifikasi tanaman sebagai tanaman sela.

#### **c. Kehutanan.**

Luas hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali sampai saat ini dirasakan masih kurang dari batas minimal bila dibandingkan dengan luas areal Propinsi Daerah Tingkat I Bali karenanya akan terus diusahakan penambahan luas hutan melalui pengukuhan kawasan hutan serta usaha menghutankan kembali daerah-daerah tandus/kritis. Peningkatan produksi hutan akan diusahakan pada kayu sebagai bahan industri kerajinan tangan di samping hasil-hasil hutan non kayu.

#### **d. Peternakan.**

Peternakan yang sampai saat ini sebagian besar merupakan usaha sambilan oleh petani, akan diusahakan ke arah usaha-usaha yang ber-

sifat komersial ekonomis dengan memperbaiki mutu daging ternak. Di samping itu terus dilaksanakan peningkatan populasi ternak. Usaha-usaha di atas perlu ditunjang dengan mengembangkan hijauan makanan ternak, pembibitan ternak-ternak unggul dan usaha penanggulangan dan pemberantasan penyakit ternak. Untuk dapat menambah penghasilan petani ternak perlu dikembangkan usaha-usaha aneka ternak.

e. **Perikanan.**

Propinsi Daerah Tingkat I Bali mempunyai potensi sumber daya perikanan yang cukup besar untuk pengembangan produksi perikanan baik sebagai komoditi export maupun dalam rangka pemenuhan akan protein hewani bagi masyarakat. Untuk ini dibutuhkan modernisasi armada perikanan rakyat dan alat-alat penangkapan serta ketrampilan para nelayan dengan memperhatikan kelestarian sumber-sumber daya tersebut melalui pencegahan pengerusakan sumber-sumber dengan alat-alat terlarang, di samping usaha-usaha pengembangan budi daya laut. Produksi perikanan darat juga perlu dikembangkan untuk usaha-usaha diversifikasi sumber penghasilan petani ikan melalui intensifikasi dan atau ekstensifikasi pemeliharaan kolam ikan di kolam, tambak, sawah dan perairan umum.

Peningkatan hasil nelayan melalui perbaikan sistem pemasaran dengan mengadakan sarana-sarana pengawetan/pengolahan ikan, tempat-tempat pendaratan dan pelelangan ikan di samping memfungsikan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat seperti Koperasi Unit Desa.

1.2. **Pengairan.**

- a. Untuk menunjang pembangunan sektor pertanian, khususnya dalam usaha peningkatan produksi pangan, pembangunan pengairan dilanjutkan dan diarahkan untuk menyediakan air irigasi yang cukup, mengamankan areal produksi pangan dari kerusakan akibat bencana banjir.
- b. Pembangunan pengairan sebagai tersebut di atas, perlu diteruskan dan ditingkatkan khususnya di daerah-daerah yang dapat meningkatkan produksi dalam waktu yang pendek. Dalam hubungan ini Subak sebagai organisasi pemakai air akan memberikan partisipasinya secara aktif dalam usaha-usaha pemeliharaan saluran dan pembangunan-pembangunan pengairan serta pengaturan air secara lebih efisien.
- c. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana pengairan ditujukan untuk mengembangkan, mengatur dan menjaga kelestarian sumber-sumber air, menunjang penyediaan air untuk kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan industri dan kelistrikan.
- d. Perlu lebih ditingkatkan kegiatan pengembangan air tanah khususnya di Daerah-daerah pertanian kering dan rawan terutama terhadap sawah tadah hujan.

## 2. Industri.

- a. Aktivitas sektor industri di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang sedang dikembangkan adalah industri sedang, kecil dan kerajinan. Aktivitas ini dikembangkan sebagai salah satu upaya di dalam usaha menampung kelebihan tenaga kerja yang ada di sektor pertanian dalam arti luas.
- b. Mengingat keadaan dan keberadaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang berdasarkan inventarisasi potensi kekayaan alam menunjukkan bahwa daerah Propinsi daerah Tingkat I Bali sebagian besar terdiri dari bahan galian golongan "C" sedangkan bahan galian lainnya belum diadakan penelitian secara mendalam. Untuk itu kiranya industri yang cocok dikembangkan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali ialah industri kecil dan kerajinan. Dan agro industri untuk mengolah hasil-hasil pertanian.
- c. Sementara ini aktivitas-aktivitas industri yang telah dan sedang dilaksanakan serta perlu ditingkatkan oleh masyarakat adalah kegiatan-kegiatan industri kecil dalam bentuk usaha-usaha kecil di bidang kerajinan, produksi bahan bangunan, pakaian jadi dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Peranan Pemerintah dalam hal ini berupa kegiatan-kegiatan penyuluhan dan pembinaan serta bantuan berupa peralatan bangunan dan bahan serta bimbingan teknis dan management. Kegiatan-kegiatan ini banyak dilakukan oleh Departemen Perindustrian, penyuluhan dan pembinaan tersebut perlu ditingkatkan baik disentra-sentra industri maupun di luar sentra.
- d. Untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas industri tersebut terhadap lingkungan kiranya diperlukan suatu pilot proyek serta suatu usaha perencana terpadu.  
Sebagai misal pilot proyek tungku pembakaran batu kapur bukit yang dibuat dengan harapan bisa menghindari pengambilan batu karang laut sebab pengambilan karang laut secara terus menerus sudah barang tentu akan mengganggu kelestarian ekologi pantai/laut. Begitu pula halnya pembakaran kapur dengan kayu api di samping menimbulkan polusi udara juga merusak ekologi hutan.
- e. Perlu dikembangkan industri-industri hilir menunjang industri hulu.

## 3. Pertambangan & Energi.

### 3.1. Pertambangan.

Sebagian besar bahan galian yang ada di Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah bahan galian golongan "C" seperti misalnya : pasir, batu padas, batu kali, batu karang, krikil dan kaolin. Untuk menentukan adanya jenis bahan galian golongan "B" dan "A" kiranya perlu diadakan penelitian yang lebih intensif.

### 3.2. Energi.

#### Kelistrikan.

- a. Meningkatkan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dengan mutu pelayanan yang baik serta harga yang terjangkau oleh masyarakat antara lain melalui sistem paket Pedesaan dan terus me-

ngembangkan Kredit Listrik Pedesaan yang telah mulai dirintis pada tahun ketiga Repelita III.

- b. Meneruskan usaha memasukkan listrik ke desa-desa untuk mendorong kegiatan sosial dan ekonomi di Daerah Pedesaan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- c. Mengusahakan pemanfaatan sumber energi yang ada antara lain panas bumi di Batukaru dan sumber energi lainnya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

#### 4. Perhubungan dan Pariwisata.

##### 4.1. Perhubungan.

###### a. Perhubungan Darat.

Pertambahan kendaraan bermotor (mobil penumpang, mobil barang, sepeda motor) yang tidak seimbang dengan pertambahan jumlah panjang jalan merupakan salah satu faktor yang akan menimbulkan persoalan-persoalan lalu lintas. Untuk menanggulangi persoalan-persoalan tersebut perlu adanya peningkatan/pengembangan fasilitas dan pengawasan lalu-lintas jalan.

###### b. Jalan dan Jembatan.

Dengan semakin meningkatnya pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi menyebabkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan jumlah peningkatan/penyediaan sarana jalan sehingga untuk memperlancar aktivitas-aktivitas tersebut harus dilanjutkan kebijaksanaan-kebijaksanaan seperti :

- 1). Memperbaiki/memelihara jalan ekonomi, jalan lingkungan, jalan Desa.
- 2). Penambahan jaringan jalan dengan pembangunan jalan baru.
- 3). Meningkatkan fungsi jalan untuk mencapai manfaat yang lebih tinggi dalam keamanan dan kenyamanan di jalan.
- 4). Mencari kemungkinan-kemungkinan teknologi untuk pembinaan sistem yang efektif, efisien dan terjangkau oleh masyarakat banyak.

###### c. Perhubungan Laut.

Peningkatan arus barang/penumpang melalui pelabuhan Benoa, Celukan Bawang, Padangbai, membutuhkan peningkatan fasilitas-fasilitas untuk memperlancar arus barang/penumpang tersebut. Oleh karena itu kebijaksanaan-kebijaksanaan berupa peningkatan/pertambahan fasilitas dan pelayanan pelabuhan laut di Propinsi Daerah Tingkat I Bali perlu dilanjutkan.

#### **d. Lalu Lintas Angkutan Danau, dan Penyebrangan.**

Dengan berkembangnya angkutan antar Pulau, yaitu antara Pulau Bali dengan Pulau Jawa dan antara Pulau Lombok dengan Pulau Jawa melalui Pulau Bali, angkutan penyebrangan merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting untuk kelancaran arus lalu lintas tersebut. Di samping itu angkutan Danau juga merupakan salah satu sarana perhubungan yang dapat meningkatkan pembangunan di Daerah Bali, khususnya pembangunan di bidang kepariwisataan, sehingga perlu peningkatan pengamanan serta perluasan fasilitas prasarana dan sarana yang diperlukan seperti kapal dan dermaga.

#### **e. Perhubungan Udara.**

Mengingat pelabuhan udara Ngurah Rai merupakan kunci daripada perkembangan pariwisata di Daerah dan merupakan pintu masuk melalui udara yang menghubungkan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Indonesia) dengan luar Negeri, maka perlu meningkatkan baik fasilitas, penguatan operasional serta pelayanannya agar terjamin keseimbangan antara kebutuhan akan jasa angkutan udara dengan sarana yang disediakan sehingga didapatkan suatu pelayanan yang lancar dan teratur.

#### **f. Telekomunikasi.**

1. Telepon sebagai alat komunikasi yang cepat, efektif dan efisien perlu ditingkatkan penggunaannya dan dipertahankan kelancaran pelayanannya. Penggunaan jasa telepon akan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas sehingga dapat menghemat energi dan mengurangi polusi udara, maka daripada itu perlu ditingkatkan jaringan dan sambungan telekomunikasi serta meningkatkan mutu pelayanannya.
2. Di samping itu mengingat tarif pemasangan telepon yang relatif mahal dibandingkan dengan kemampuan masyarakat Daerah Bali pada umumnya, maka untuk pemerataan pelayanan perlu penambahan jumlah telepon umum pada lokasi-lokasi pusat perdagangan, pusat hiburan dan tempat-tempat lain yang mudah dicapai.

#### **g. Pos dan Giro.**

1. Pos dan Giro yang merupakan sarana komunikasi yang biasanya relatif rendah sehingga dapat dimanfaatkan oleh segala lapisan masyarakat. Mengingat masyarakat yang memakai jasa Pos dan Giro semakin meningkat dan jarak dari kantor Pos/bis surat masih agak jauh terhadap masyarakat yang menggunakan jasa tersebut terutama pada wilayah Kecamatan yang belum ada kantor Pos Pembantunya, maka pembangunan/penambahan jaringan Pos dan Giro perlu terus ditingkatkan sehingga dapat menjangkau semua desa-desa/daerah terpencil.

2. Di samping itu untuk mempercepat proses penyampaian jasa Pos dan Giro dengan aman dan teratur perlu ditunjang dengan penyempurnaan/melengkapi nama jalan-jalan dan nomor rumah/bangunan.

#### 4.2. Pariwisata.

Propinsi Daerah Tingkat I Bali kaya akan potensi kepariwisataan yang dapat dikembangkan sebagai modal utama bagi pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Arah dan kebijaksanaan pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. Kepariwisataan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali perlu ditingkatkan dan diperluas untuk ikut serta meningkatkan penerimaan devisa negara, perluasan kesempatan kerja, perluasan kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat Daerah dan Nasional.
- b. Pengembangan, pembangunan dan pengawasan pariwisata dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kelestarian dan terpeliharanya kebudayaan yang ada di Propinsi Daerah Tingkat I Bali karena pariwisata yang dilaksanakan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah Pariwisata Budaya yang bersumber pada Agama Hindu.
- c. Dalam usaha memajukan pengembangan dan pembangunan pariwisata sebagai disebutkan di atas, perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu antara lain di bidang :
  - 1). P r o m o s i.
  - 2). Penyediaan fasilitas penunjang wisata.
  - 3). Mutu dan kelancaran pelayanan.
  - 4). Pengembangan, pembinaan dan pemeliharaan obyek-obyek pariwisata.
  - 5). Pembinaan lembaga pendidikan kepariwisataan dan kursus-kursus kepariwisataan lainnya.
  - 6). Pemerataan pengembangan kepariwisataan.
  - 7). Pembinaan dan pengembangan wisata domestik dengan tujuan untuk lebih mengenal alam dan kebudayaan bangsa. Di samping itu untuk memperluas kesempatan berusaha dan memperluas kesempatan kerja.

#### 5. Perdagangan dan Koperasi.

##### 5.1. Perdagangan.

Kegiatan sektor perdagangan adalah kegiatan perantara yang merupakan penghubung antara produsen dan konsumen.

Dari kegiatan ini akan diperoleh jasa sebagai imbalan hasil usaha.

Kegiatan perdagangan yang dilaksanakan dan berkembang selama ini di Propinsi Daerah Tingkat I Bali meliputi kegiatan perdagangan antar pulau, perdagangan lokal, dan perdagangan luar negeri. Dalam Repelita IV dengan pengalaman-pengalaman tahun yang terdahulu kegiatan perdagangan akan ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang semakin meningkat.

Langkah-langkah kebijaksanaan yang akan ditempuh di bidang perdagangan antara lain :

- 1). Mengembangkan efisiensi dan efektifitas penyaluran dan tata niaga barang dan jasa dalam menunjang peningkatan produksi.
- 2). Dengan semakin sempurnanya tata niaga barang dan jasa dapat diharapkan bisa meningkatkan pemasaran, sehingga lebih menguntungkan produsen maupun konsumen.
- 3). Mengembangkan sarana penunjang di bidang perdagangan seperti sarana fisik (pembangunan pasar-pasar dan pertokoan terutama yang dapat dijangkau oleh pedagang golongan ekonomi lemah), sarana non fisik yang meliputi peraturan-peraturan yang mempermudah prosedur/proses pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan.
- 4). Meningkatkan peranan pedagang, khususnya pedagang golongan ekonomi lemah dengan mengadakan pembinaan secara terus menerus melalui kegiatan penataran, kursus-kursus, penyuluhan sehingga mereka menjadi wiraswasta yang baik.
- 5). Mengadakan sistem informasi pasar secara bertahap serta meningkatkan pengawasan mutu barang guna melindungi konsumen.
- 6). Mengembangkan dan meningkatkan ekspor komoditi non migas, dengan jalan mengusahakan peningkatan mutu dan volume komoditi-komoditi tradisional, juga mengusahakan diekspornya barang-barang setengah jadi yang dihasilkan oleh industri-industri di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

## 5.2. K o p e r a s i .

- a. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial yaitu sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Oleh karena itu diharapkan agar koperasi benar-benar dapat menjadi wahana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.
- b. Upaya untuk menciptakan dan memelihara iklim usaha yang baik bagi pertumbuhan koperasi, untuk itu diperlukan penanganan secara terpadu berbagai instansi dan golongan masyarakat serta dikembangkan kerja sama antara koperasi dengan usaha swasta dan usaha negara.
- c. Dalam usaha untuk meningkatkan peranan dan kemampuan Koperasi, perlu pembinaan dan peningkatan kemampuan management, ketrampilan, pemupukan modal dan kewiraswastaan.
- d. Pembinaan diarahkan agar koperasi mampu melaksanakan fungsinya sebagai wadah untuk mengembangkan ekonomi rakyat melalui penyuluhan dalam berbagai aspek.
- e. Meningkatkan peranan dan kemampuan KUD dan Koperasi lainnya sehingga menjadi kekuatan ekonomi masyarakat menuju kemajuan dan kesejahteraan.
- f. Perlu ditingkatkan dan diperluas peranan dan usaha koperasi di berbagai sektor seperti pertanian, pariwisata, perindustrian, angkutan dan lain-lain.

## 6. Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

### 6.1. Tenaga Kerja.

- a. Perluasan dan pemerataan kesempatan kerja serta peningkatan mutu dan perlindungan tenaga kerja merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di segala sektor. Tenaga kerja di samping sebagai salah satu faktor pembangunan, adalah sekaligus sebagai manusia yang harus memperoleh pendapatan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.  
Angkatan kerja setiap tahunnya selalu mengalami penambahan, oleh karenanya perlu diimbangi dengan usaha perluasan kesempatan kerja dengan imbalan jasa yang sepadan. Perluasan kesempatan kerja agar diciptakan dengan melalui program-program pembangunan baik sektoral maupun regional. Sehingga usaha pembangunan yang dilaksanakan bukan semata-mata dalam rangka peningkatan produksi barang dan jasa akan tetapi sekaligus memberi arti dalam rangka pemerataan hasil pembangunan karena adanya perluasan partisipasi masyarakat secara aktif dalam usaha-usaha pembangunan.
- b. Di samping keseimbangan secara kuantitas antara Angkatan Kerja dengan kesempatan Kerja yang akan dicapai, guna mencapai keseimbangan secara kualitas maka perlu adanya perencanaan yang bersifat terpadu dalam rangka pembinaan dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja serta pemberian informasi yang seluas-luasnya mengenai pasaran kerja.
- c. Hubungan perburuhan diarahkan kepada terciptanya hubungan perburuhan Pancasila, dimana masing-masing pihak saling menghormati dan saling mengerti terhadap peranan serta hak dan kewajibannya masing-masing dalam keseluruhan proses produksi, serta peningkatan partisipasi mereka dalam pembangunan.  
Kerjasama antar buruh, pengusaha dan pemerintah tetap ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial ekonomi kaum buruh di satu pihak dan memajukan perusahaan di lain pihak, untuk ini perlu di galakkan pembentukan serikat buruh dan gabungan pengusaha.
- d. Di bidang perlindungan tenaga kerja ditujukan kepada perbaikan upah, syarat kerja, kondisi kerja dan hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan jaminan sosial di dalam rangka perbaikan kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh.

### 6.2. Transmigrasi.

- a. Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai Daerah pengirim transmigrasi, di dalam usaha peningkatan pelaksanaan Program Transmigrasi bukan hanya semata-mata dilaksanakan guna pemenuhan target pemindahan transmigrasi, akan tetapi sekaligus guna meningkatkan aspek pelayanan bagi para transmigran yang dipindahkan sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Sebab pelaksanaan program transmigrasi adalah menyangkut aspek-aspek manusiawi yang sangat mendalam. Untuk itu perlu men-

dapat keyakinan bahwa daerah penerima sudah siap sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

- b. Peningkatan pelaksanaan program transmigrasi ditempuh dengan cara, memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, peningkatan ketrampilan, terutama ditujukan kepada masyarakat prioritas pengerahan calon transmigrasi yaitu Daerah Bencana Alam, Daerah Kritis/Tandus, Daerah Padat Penduduk dan Daerah Pengembangan Pembangunan. Di samping itu juga terhadap masyarakat/para petani yang mengusahakan tanah pertanian kurang atau lebih kecil daripada 0,25 Ha/KK.
- c. Penyelenggaraan program transmigrasi adalah bersifat lintas sektoral oleh karenanya di dalam pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat, Daerah Pengirim, Daerah Penerima dan Instansi-instansi yang terkait di dalamnya secara mantap.
- d. Penyelenggaraan program transmigrasi diarahkan guna lebih banyak mendorong transmigrasi spontan, di samping transmigrasi umum yang penyelenggaraannya langsung digerakkan oleh Pemerintah. Dalam pada itu Pemerintah Daerah ikut membantu memberikan paket dana dalam batas-batas kemampuan yang ada terhadap penyelenggaraan transmigrasi spontan.
- e. Selama dalam masa pembinaan Pemerintah Daerah perlu memonitor keadaan para transmigran tersebut.

## 7. Pembangunan Daerah, Desa dan Kota.

- a. Pembangunan Daerah Tingkat II dilaksanakan secara selaras dengan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Pembangunan Sektoral, sehingga pembangunan Daerah Tingkat I maupun pembangunan sektoral di daerah-daerah Tingkat II benar-benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah.
- b. Perhatian sebesar-besarnya perlu diberikan kepada peningkatan pembangunan pedesaan terutama peningkatan prasarana dan peran serta masyarakat Desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung maupun yang tidak langsung diperuntukkan bagi pembangunan pedesaan.
- c. Pembangunan Daerah Tingkat II, agar memperhatikan rencana dan peranan kota, memperhatikan keserasian hubungan antara kota dan lingkungannya, antar kota dengan Daerah pedesaan, serta memperhatikan kerjasama antara Kabupaten Dati II sehingga mewujudkan laju pertumbuhan pembangunan yang seimbang.
- d. Pembangunan Desa.

Pembangunan Desa dapat diartikan sebagai suatu usaha pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada unit pemerintahan yang terendah, baik di desa maupun di Kelurahan, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dari masyarakat Desa/Kelurahan itu sendiri.

Pembangunan Desa itu sendiri meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Mekanismenya pada hakekatnya merupakan suatu proses perpaduan dalam suatu imbalanced kewajiban yang serasi antara berbagai ke-

giatan Pemerintah di satu pihak dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat di pihak yang lain.

Dalam hal ini masyarakat Desa/Kelurahan berkewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dengan prakarsa dan swadaya gotong royong.

Sedangkan campur tangan Pemerintah hanya terbatas dalam bentuk memberikan pengarahan, bimbingan, pembinaan, bantuan dan pengawasan. Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang meliputi 8 Kabupaten dan 51 Kecamatan terdiri atas 594 Desa/Kelurahan yang bersifat administratif, dengan perincian 515 Desa dan 79 Kelurahan. Di samping itu terdapat pula 1456 Desa Adat dan 3627 Banjar Adat yang pembinaannya perlu terus ditingkatkan karena kenyataannya telah menunjukkan bahwa Desa Adat dan Banjar memegang peranan penting di dalam pembangunan.

## 8. Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sejalan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa maka pembangunan kehidupan beragama merupakan unsur kehidupan yang mutlak bagi rakyat dalam rangka pembangunan manusia yang seutuhnya.

Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan yang makin cepat dan kompleks perlu ditingkatkan pengembangan dan pembinaan kehidupan beragama sebagai landasan dan titik tolak berhasilnya pembangunan itu sendiri secara merata adil dan menyeluruh.

Arti penghayatan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai dimensi yang vertikal dan horizontal, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan antara manusia dengan sesama termasuk alam lingkungannya, yang kesemuanya itu harus ditumbuhkan, dibina dengan serasi dan seimbang. Bertalian dengan kebijaksanaan sebagai tersebut di atas maka sasaran-sasaran yang perlu dicapai antara lain sebagai berikut :

- a. Membina serta meningkatkan kesadaran umat beragama dalam rangka tetap terpeliharanya kerukunan sesama umat beragama, di antara sesama penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan antara semua umat beragama dan semua penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Bantuan perbaikan dan peningkatan fasilitas tempat peribadatan dan sarana-sarana peribadatan dalam keagamaan yang diperlukan.
- c. Bantuan dan pembinaan lembaga-lembaga pendidikan agama.
- d. Pembinaan Lembaga Adat dalam rangka usaha peningkatan peranan serta partisipasinya dalam pembangunan.
- e. Melakukan pembinaan kepada penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

## 9. Pendidikan Generasi Muda dan Olah Raga.

### 9.1. Pendidikan.

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan/kecerdasan dan ketrampilan bagi setiap orang/bangsa.

Dalam rangka mencapai maksud tersebut di atas, selain dengan peningkatan pengembangan fungsi pendidikan yang bersifat formal dan non formal yang telah ada, maka sasaran pembangunan di bidang pendidikan akan diarahkan pada :

- a. Pengembangan terhadap mental/bakat si anak di sekolah agar diperoleh hasil pendidikan berupa tenaga-tenaga pembangunan yang mempunyai daya kreatif tinggi.
- b. Pembinaan/pengembangan lebih lanjut di bidang pendidikan Dasar/Lanjutan Pertama/Lanjutan Atas/Perguruan Tinggi, agar didapatkan hasil pendidikan berupa tenaga-tenaga yang siap pakai.
- c. Peningkatan usaha penuntasan anak usia sekolah untuk belajar di tingkat pendidikan dasar terutama lewat sistem pamong.
- d. Peningkatan/pengembangan pendidikan yang bersifat kejuruan.
- e. Peningkatan sarana/prasarana pendidikan.

Kesemua langkah-langkah yang ditempuh tersebut di atas adalah dengan tujuan selain pemerataan perluasan kesempatan belajar, juga dalam arti peningkatan mutu dari pendidikan itu sendiri agar dapat diciptakan tenaga-tenaga yang siap pakai.

## 9.2. Generasi Muda dan Olah Raga.

Pembangunan di bidang kepemudaan integral dengan pembangunan bangsa pada umumnya. Untuk lebih meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab pemuda dalam pembangunan Nasional yang semakin meningkat dari tahun ke tahun demi tercapainya kesejahteraan Nusa dan Bangsa, maka pembinaan generasi muda perlu terus ditingkatkan melalui perencanaan yang konkrit.

Adapun sasaran pokok yang harus dicapai dalam pembinaan terhadap generasi muda tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pembinaan ketrampilan, pembinaan wadah-wadah generasi muda seperti antara lain Pramuka, KNPI, Karang Taruna dan Sekehe-Sekehe Taruna-Teruni, dan P-4 agar mampu menjadi kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan Nasional yang mampu mewujudkan masa depannya sendiri.
- b. Menyalurkan segala aktifitas generasi muda melalui pembinaan mental dan fisik guna menanggulangi kenakalan remaja.
- c. Penyaluran dan penanggulangan terhadap anak-anak drop-out melalui pendidikan yang bersifat non formal.

## 9.3. Olah Raga.

- a. Meningkatkan sarana dan kegiatan olah raga dengan usaha penyediaan fasilitas dan pusat kegiatan olah raga di setiap lingkungan pemukiman.
- b. Mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olah raga dalam membina kesegaran jasmaniah dan rohaniah untuk mewujudkan ketahanan bangsa.

- c. Meningkatkan dan membina secara berlanjut prestasi olah raga yang telah dicapai maupun sarana-sarana pendukungnya yang diperlukan.

## 10. K e b u d a y a a n.

Kebijkaksanaan dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan sedapat mungkin diarahkan kepada penumbuhan dan pemupukan watak yang mencerminkan ciri khas kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila.

Dalam sektor kebudayaan sasaran pembangunan akan dititikberatkan pada langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengembangan seni budaya Daerah dan aspek-aspek budaya pada umumnya yang sesuai dengan kepribadian bangsa.
- b. Penyelamatan dan pemeliharaan warisan budaya Daerah dan Nasional.
- c. Pembinaan/pengembangan bahasa dan kesusastraan daerah.
- d. Peningkatan pembinaan kesenian daerah yang dapat memperkaya perbendaharaan kebudayaan Nasional dengan beranekaragam kesenian Daerah.
- e. Pemeliharaan/pemugaran peninggalan kepurbakalaan, kesejarahan dan permuseuman.
- f. Membina Sekehe-Sekehe/Organisasi-Organisasi Seni terutama organisasi seni yang bersifat tradisional.
- g. Pembuatan film dokumentasi bagi kesenian klasik yang hampir punah serta para seniman yang berjasa.
- h. Pengembangan perpustakaan dengan meningkatkan pembinaan serta fungsi perpustakaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat.

## 11. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Peranan Wanita.

### 11.1. K e s e h a t a n.

Untuk memperluas kesempatan guna mendapat derajat kesehatan yang lebih baik bagi warga masyarakat untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dalam Pelita IV perlu diprioritaskan :

- a. Peningkatan pelayanan kesehatan Puskesmas : Jangkauan dengan menambah jumlah serta peningkatan kwalitas Puskesmas/Puskesmas Pembantu, rumah Dokter, rumah staf, peralatan medis, Puskesmas Keliling, RSUD-RSU, tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga para medis dan penyediaan obat-obatan yang semakin merata dan terjangkau oleh rakyat banyak.
- b. Usaha Perbaikan Gizi Keluarga : membina masyarakat agar dapat menuju sadar gizi dan mampu gizi.
- c. Peningkatan kesehatan lingkungan : pembuangan dan pengolahan kotoran sanitasi, tempat-tempat umum dan tempat-tempat kerja, kesehatan perumahan sanitasi industri, pembinaan lingkungan sosial, sanitasi makanan dan lingkungan.
- d. Pencegahan dan pembrantasan penyakit : antara lain dengan memutuskan mata rantai penularnya, integrasi dengan penyakit-penyakit lain,

meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, pencegahan dan pengobatan penyakit seperti diare/GE, demam, tipus, gondok dan lain-lain, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan non formal/penyuluhan kesehatan.

- e. Pencegahan sebab-sebab kecacatan, baik kecacatan fisik, mental dan gangguan jiwa disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, penyalahgunaan obat narkotika dan lain-lain.
- f. Pengembangan tenaga kesehatan : Perencanaan secara terpadu antara bidang dalam pendidikan dan penyuluhan tenaga kesehatan, peningkatan pengelolaan dan pembinaan tenaga kesehatan, dan peningkatan penyebaran, pendayagunaan, kesejahteraan sosial, pengembangan karir.

## 11.2. Kesejahteraan Sosial.

Dalam jangka panjang, pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, lebih diarahkan pada peningkatan mutu dan memperluas jangkauan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang lebih adil dan merata dengan mengutamakan kelompok-kelompok masyarakat yang menyanggah masalah sosial, peningkatan partisipasi sosial masyarakat, serta sistem nilai dan sikap sosial yang dapat menunjang pembangunan secara menyeluruh.

Permasalahan yang perlu mendapat prioritas di bidang kesejahteraan sosial di Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah :

- a. Kesejahteraan anak dan keluarga (termasuk orang miskin dan anak terlantar).
- b. Masalah tuna susila.
- c. Kenakalan anak dan remaja.
- d. Masalah gelandangan dan pengemis.
- e. Masalah korban akibat bencana alam dan korban lain-lain.
- f. Masalah penderita cacat fisik dan mental.
- g. Masalah lanjut usia (jompo).
- h. Masalah-masalah lain seperti pembinaan pahlawan, termasuk tugu/makam, prasarana dan sarana penunjang, hari-hari raya Nasional.

## 11.3. Peranan Wanita.

Peranan Wanita dalam pembangunan tidak mengurangi peranannya dalam pembinaan keluarga sejahtera umumnya dan pembinaan generasi muda pada khususnya, dalam rangka pembinaan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk lebih memberikan peranan dan tanggung jawab kepada kaum wanita dalam pembangunan, maka pengetahuan dan ketrampilan wanita perlu ditingkatkan di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhannya. Panca Dharma Wanita menyebutkan bahwa peranan wanita ada 5 (lima) yaitu sebagai isteri, ibu rumah tangga, pendidik anak, penyambung keturunan dan sebagai anggota masyarakat.

Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali wanita telah secara aktif mengambil bagian dalam setiap kegiatan pembangunan baik dalam kemasyarakatan, maupun dalam pembinaan anak/generasi muda.

Pendekatan ke desa-desa dan penyuluhan-penyuluhan perlu terus ditingkatkan sehingga peranan wanita di dalam menciptakan kesejahteraan keluarga dan dalam mensukseskan pembangunan dapat terlaksana.

Di dalam peranannya sebagai pelaksana pembangunan maka sasaran yang hendak dituju antara lain :

- a. Meningkatkan peranan dan tanggung jawab kaum wanita dalam pembangunan dengan jalan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhannya melalui wadah organisasi wanita dan peningkatan pelaksanaan kegiatan PKK.
- b. Meningkatkan kemampuan organisasi wanita dalam penyediaan dana, prasarana, sarana, sehingga pelaksanaannya sebagai pelaksana pembangunan yaitu memberikan penyuluhan, pendidikan dan pembinaan dapat berjalan lancar.

## 12. Kependudukan dan Keluarga Berencana.

### 12.1. Kependudukan.

Masalah pokok mengenai kependudukan adalah jumlah penduduk yang selalu bertambah, di lain pihak wadah fisik sebagai wadah potensi wilayah penampungan yang terbatas dan tetap adanya. Untuk mencapai batas ideal pemilikan tanah garapan yaitu seluas : 2 hektar/KK maka usaha-usaha yang dilaksanakan adalah :

- a. Meningkatkan program transmigrasi baik secara kuantitas maupun secara kualitas.
- b. Mensukseskan program kependudukan dan keluarga berencana dalam rangka penurunan tingkat kelahiran dan juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.
- c. Meningkatkan administrasi dan inventarisasi data-data kependudukan.
- d. Penertiban penduduk yang masuk maupun yang bertempat tinggal di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### 12.2. Keluarga Berencana.

- a. Program Nasional Keluarga Berencana sebagai salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan cara menurunkan tingkat kelahiran dan kemudian sekaligus menciptakan keluarga kecil yang berbahagia dan sejahtera.
- b. Untuk menciptakan tujuan tersebut dilaksanakan usaha-usaha :
  - 1). Memberikan penerangan dan motivasi kepada masyarakat dengan mempergunakan Sistem Banjar. Masyarakat yang telah diberikan penerangan dan motivasi sejak permulaan pelaksanaan program keluarga berencana, akhirnya menjadi sadar dan yakin bahwa

program keluarga berencana perlu dilaksanakan demi untuk mencapai kesejahteraan keluarga masing-masing. Dengan demikian masyarakat akan mengambil alih kegiatan program keluarga berencana dan mengelola program keluarga berencana secara aktif sehingga diharapkan partisipasi masyarakat terhadap program keluarga berencana senantiasa meningkat.

- 2). Meningkatkan peserta keluarga berencana dengan mengusahakan lebih banyak para pasangan usia subur menjadi peserta keluarga berencana baru secara sadar dan sukarela. Prinsip sadar dan sukarela dalam pelaksanaan program keluarga berencana adalah merupakan ciri melembaganya program keluarga berencana di dalam masyarakat. Disamping itu juga dilaksanakan usaha memelihara kelestarian peserta keluarga berencana yang telah ada.
- c. Untuk memperlancar pelaksanaan program keluarga berencana maka pengadaan fasilitas program seperti tenaga, sarana dan dana ditingkatkan.

### 13. Pemukiman dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, disamping penyediaan sandang dan pangan pada tingkat harga yang wajar serta perluasan lapangan kerja maka pembangunan perumahan perlu makin ditingkatkan khususnya perumahan dengan harga yang dapat dijangkau oleh golongan masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah dan ini merupakan sasaran yang penting. Pembangunan Perumahan merupakan kebutuhan yang terus meningkat, oleh karena penduduk terus bertambah, penggantian rumah yang rusak karena umur dan adanya bencana alam. Dalam pembangunan perumahan perlu dikembangkan suatu sistem yang lebih terarah dan terpadu yang berkaitan dengan tata guna tanah perkotaan dan pedesaan serta kesehatan lingkungan pemukiman. Disamping itu perlu makin ditingkatkan pula pembangunan perumahan dengan harga yang dapat dijangkau oleh golongan masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah.

Pembangunan perumahan dan program-program pemugaran perumahan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah berjalan sebagaimana mestinya, dan di masa mendatang masih perlu ditingkatkan lagi, dengan pembatasan-pembatasan dan berpola sebagai berikut :

- a. Didalam pembangunan dan perkembangan daerah pemukiman supaya mencerminkan kepribadian khas Bali, hendaknya daerah pemukiman itu ditata menurut Asta Bumi dan Asta Kosala Kosali, serta tidak merusak/mengurangi daerah pertanian yang produktif dan kawasan hutan.
  - b. Untuk menghindari pudarnya ciri Arsitektur Khas Bali, maka didalam membangun perumahan rakyat dan bangunan-bangunan lainnya baik yang dibangun oleh swasta dan terutama oleh Pemerintah di samping memenuhi syarat teknis dan kesehatan hendaknya selalu mencerminkan wajah Arsitektur Tradisional Bali.
- Hal ini perlu ada pengawasan terus dari Pemerintah.

#### 14. H u k u m.

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan hukum adalah terciptanya kepastian hukum untuk dapat diciptakan tertib masyarakat yang memenuhi rasa keadilan.

Terciptanya kepastian dan tertib hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, sangat membantu kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan disegala bidang, baik dalam bidang perekonomian maupun dalam bidang sosial budaya.

Didalam Hukum Tata Pemerintahan dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah baik dalam urusan etonomi maupun tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi sasarannya adalah terciptanya tertib hukum dan tertib masyarakat agar dapat dicapai hasilguna dan dayaguna yang semaksimal mungkin.

Untuk mencapai keseluruhan tujuan tersebut diatas, langkah-langkah yang perlu ditempuh antara lain :

- a. Meningkatkan pengetahuan/ketrampilan para aparat penegak hukum baik dengan jalan penataran maupun dengan penyediaan buku-buku pengetahuan hukum, dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa aparat penegak hukum.
- b. Inventarisasi, pengumpulan dokumen dan peninjauan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bidang dekonsentrasi, urusan otonomi, tugas pembantuan maupun nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c. Mengadakan inventarisasi dan dukumentasi data mengenai materi hukum.
- d. Meningkatkan pembinaan dan penanaman kesadaran hukum kepada masyarakat.
- e. Meningkatkan penyuluhan dan bantuan hukum kepada masyarakat.

#### 15. K a m t i b m a s.

Demi kelancaran dan suksesnya pelaksanaan pembangunan dalam masyarakat, perlu diciptakan keadaan yang antara lain :

- a. Keamanan, ketertiban dalam masyarakat terus dibina dan ditingkatkan yang berlandaskan kepada idiologi Pancasila dan UUD 1945 dalam usaha menciptakan rasa aman dan tentram dalam menunjang suksesnya pembangunan.
- b. Perlu diciptakan suatu keadaan, dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.
- c. Peranan dan partisipasi masyarakat hendaknya diwujudkan demi suksesnya pembangunan.
- d. Perlu diadakan pembinaan bagi warga masyarakat, golongan umat, organisasi seperti organisasi profesi dan fungsional sesuai dengan fungsinya, sehingga tercipta suatu kerukunan sosial yang harmonis.
- e. Dalam keamanan politik dan komunikasi politik, baik antar sosial politik sendiri maupun antar sosial politik dengan aparatur pemerintah perlu ditingkatkan untuk dapat membuka suasana yang tertib dan mantap.

## 16. Penerangan Pers dan Komunikasi Rakyat.

Bahwa penerangan dan media massa bertugas menggelorakan semangat pengabdian perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional, serta menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Oleh karena itu dalam pokok-pokok kebijaksanaan umum pembangunan penerangan antara lain ditetapkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

- a. Dalam rangka mensukseskan pembangunan di Daerah perlu ditingkatkan kegiatan penerangan, penguasaan P4, dan peranan komunikasi keseluruhan pelosok Daerah seperti peranan radio, televisi dan media massa lainnya.
- b. Pembinaan dan pengembangan pers di Daerah harus didasarkan pada semangat dan jiwa Pancasila.
- c. Melalui penerangan dan komunikasi sosial diharapkan dapat menimbulkan gelora semangat pengabdian, persatuan, tugas, tanggungjawab serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- d. Pengembangan dan peningkatan kegiatan penerangan dengan penerangan komunikasi timbal balik.  
Dalam pada itu komunikasi sosial hendaknya dilaksanakan secara terpadu, terarah, jujur, bebas dan bertanggungjawab.
- e. Kegiatan penerangan dengan pendekatan kebudayaan.  
Pada dasarnya kebudayaan itu merupakan manifestasi aspirasi-aspirasi kultural yang berisikan tata nilai yang hidup pada bangsa itu.  
Dengan demikian maka kebudayaan merupakan sumber utama dari segenap kekuatan yang diperlukan bagi pembangunan.
- f. Sistem penerangan terpadu dengan jalan membina dan menjalin kerja sama yang erat dengan semua unsur penerangan yang ada dalam masyarakat.
- g. Pembinaan pers yang bebas dan bertanggungjawab.  
Dalam rangka menggelorakan semangat pengabdian perjuangan bangsa memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional serta mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional perlu ditingkatkan usaha mengembangkan pers yang sehat yaitu pers yang bebas dan bertanggungjawab.
- h. Pembangunan penerangan berpangkal tolak pemerataan arus informasi penerangan pedesaan. Sehubungan dengan itu maka penerangan harus ditingkatkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- i. Peningkatan kemampuan sarana dan program penerangan dan media massa, termasuk pendidikan dan latihan.

## 17. Ilmu pengetahuan, Tehnologi dan Penelitian.

Pengembangan Ilmu pengetahuan, Tehnologi dan Penelitian dimaksudkan untuk menunjang kegiatan pembangunan di berbagai sektor, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam mendorong usaha-usaha pembangunan, diusahakan pengembangan serta pemanfaatan tehnologi tepat guna dengan me-

neliti secara saksama tehnologi yang akan dipilih dan dapat menunjang peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan.

Penumbuhan kemampuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Tehnologi dan Penelitian mempunyai kaitan dengan semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga usaha pengembangannya memerlukan penanganan yang terkoordinir dengan saksama. Pelaksanaan pengembangan dan penerangan tehnologi diselaraskan dengan tingkat penghayatan, penyerapan dan partisipasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kehidupan lingkungan.

Dalam hubungan dengan pengetrapan teknologi tepat guna bagi usaha-usaha pembangunan maka perlu dilaksanakan pengkajian dan percobaan-percobaan dalam rangka mengembangkan metode, model, analisa serta perumusan berbagai alternatif pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang disesuaikan dengan keadaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Dalam tahun-tahun mendatang seperti halnya negara-negara berkembang lainnya maka Indonesia masih akan tergantung kepada teknologi Negara-negara maju. Akan tetapi teknologi yang dipindahkan dari Negara maju ke Negara berkembang baik yang berupa impor maupun berupa bantuan, pada dasarnya tidak selalu cocok dengan kondisi Negara berkembang itu sendiri. Benda-benda modal yang didatangkan dari luar itu tentu saja diciptakan sesuai dengan kondisi di Negara maju yaitu dimana tenaga kerja sangat langka, sedangkan di Negara berkembang pada umumnya mempunyai tenaga kerja yang berlimpah.

Oleh karena itu perlu diperhatikan apakah penggunaan teknologi yang didatangkan dari luar itu sesuai atau tidak dengan keadaan setempat.

Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian yang dilakukan pada waktu lampau menunjukkan hasil yang belum memadai. Hal ini sama-sama dirasakan karena kurangnya usaha pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai bidang dan lembaga.

Tidak terlepas dari pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tekonologi terutama dalam bidang sosial ekonomi adalah pengembangan perstatistikan. Keadaan statistik di Propinsi Daerah Tingkat I Bali juga masih jauh dari memuaskan, dan harus diakui kita memang masih lemah kalau berbicara soal angka. Selain daripada itu masih banyak informasi yang belum kita ketahui dengan pasti seperti misalnya beberapa jumlah penduduk dari luar yang menetap di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, berapa jumlah pengangguran dan berapa jumlah yang tergolong buruh tani yang tidak menguasai atau memiliki tanah sama sekali.

Masalah utama dalam penentuan dan penyempurnaan program statistik adalah kesukaran melayani tujuan dan penggunaan yang beraneka ragam daripada pemakai statistik. Sehubungan dengan itu dipandang perlu mengembangkan suatu sistem perstatistikan yang mampu menyajikan informasi yang baik, aktuil serta relevan bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan yang ada dewasa ini, melainkan juga yang dapat mengantisipasi kebutuhan di masa akan datang. Sistem demikian harus ditumbuhkan secara berangsur-angsur dan setiap kali diperluas atas dasar yang sudah dapat dibangun.

Untuk hal tersebut maka diperlukan kerja sama yang erat dan serasi antar Instansi, sehingga keperluan yang dibutuhkan dapat diantisipasi secara efektif dan dapat dihindari pekerjaan duplikasi.

Hal-hal tersebut di atas bisa diatasi dengan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan terpeliharanya secara terus menerus data pokok semacam ini, akan tersedia data berbagai variabel yang memungkinkan pembentukan model-model perkiraan pembangunan sebagai kerangka penentuan program dan proyek.

Di samping itu permasalahan lain yang juga sangat menentukan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah iklim sosial yang menguntungkan bagi usaha-usaha para ilmuwan di dalam mengadakan popularisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di tengah-tengah masyarakat.

Dalam Repelita IV mendatang kebijaksanaan pengembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi harus benar-benar dapat menunjang usaha pembangunan yang dilaksanakan di Daerah Bali dengan prioritas dan titik beratnya disesuaikan dengan kondisi dan potensi Daerah masing-masing.

Untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, kebijaksanaan yang ditempuh adalah : pada pengembangan kemampuan yang diperlukan dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan serta prioritasnya. Cabang-cabang Ilmu Pengetahuan tertentu yang penting tapi kurang peminatnya, perlu mendapatkan perhatian khusus.

Lembaga-lembaga Penelitian ditingkatkan daya gunanya sesuai dengan prioritas pembangunan dan di samping itu ditingkatkan pula sistem informasi mengenai kegiatan hasil penelitian.

Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta perlu dengan dana untuk meningkatkan jumlah penelitian, mendorong pengembangan Ilmu Pengetahuan dan meningkatkan pengetahuan para peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan mengembangkan hasil-hasilnya dalam pengembangan Ilmu.

Dengan demikian diharapkan akan tercipta landasan yang lebih kokoh bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mampu berswadaya dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan di Daerah.

Pemanfaatan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat yaitu tetap memberikan kesempatan kerja banyak, meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan meningkatkan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif di samping tetap terbinanya keseimbangan dan keserasian lingkungan.

## 18. Aparatur Pemerintahan.

Peranan Kepala Wilayah/Daerah sebagai Pengusaha Tunggal di Daerah perlu secara terus menerus dimantapkan sesuai dengan jiwa Undang-undang No. : 5 Tahun 1974, untuk itu perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan koordinasi dan mekanisme kerja antara Pimpinan Daerah dalam menanggulangi masalah-masalah sosial politik secara tepat dan cepat, untuk itu perlu adanya komunikasi timbal balik.
- b. Peningkatan ketrampilan dan disiplin para Aparatur Pemerintah di Daerah.

- c. Peningkatan prasarana dan sarana kerja dalam menunjang tugas-tugas administrasi pemerintahan.
- d. Pemantapan sistem Pemerintahan dan mekanisme Pemerintahan Desa.

### 19. Pengembangan Dunia Usaha.

Sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam pembangunan kita maka arah dan kebijaksanaan pembinaan usaha swasta dan usaha golongan ekonomi lemah ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan partisipasi dan prakarsa masyarakat dalam pembangunan maka usaha swasta nasional perlu lebih diaktifkan dan diperluas. Kerja sama yang serasi antara Pemerintah, Perusahaan milik Negara/Daerah, Usaha Swasta dan Koperasi perlu ditingkatkan.
- b. Pemerintah menciptakan iklim yang sehat yang diperlukan untuk kelancaran usaha dengan jalan membina ketentraman dan keamanan usaha, menyederhanakan prosedur perijinan, melindungi dari persaingan yang tidak sehat dan lain-lain.
- c. Pembinaan usaha golongan ekonomi lemah dilaksanakan antara lain dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan, kursus-kursus serta pemberian bantuan kredit dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan/lebih lunak.
- d. Jenis-jenis usaha tertentu seperti usaha-usaha kerajinan yang umumnya bersifat tradisional dan merupakan golongan ekonomi lemah perlu mendapat perlindungan dan pembinaan.
- e. Meningkatkan peranan Kadin dalam rangka pembinaan terhadap pengusaha-pengusaha.

### 20. Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

- a. Meningkatkan pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi sumber alam dengan tujuan untuk lebih mengetahui dan memanfaatkan potensi sumber alam, baik yang ada di darat, laut maupun udara, berupa tanah, air, energi, flora, fauna dan lain-lain demi kelangsungan hidup masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat itu sendiri.
- b. Mengembangkan dan melestarikan kemampuan sumber daya alam hutan, tanah dan air untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dengan terus melanjutkan dan makin menyempurnakan program penyelamatan hutan, tanah dan air.
- c. Meningkatkan mutu pelayanan di bidang Meteorologi dan Geofisika baik untuk Instansi-Instansi Pemerintah maupun masyarakat.
- d. Mengembangkan dan membina Bali yang lestari dan indah dalam rangka Bali menuju Pulau Taman melalui pengembangan aspek lanskap, arsitektur tradisional, tata ruang dan tata kemasyarakatan, seni budaya yang bersumber pada Agama Hindu sejalan dan sesuai dengan perkembangan kemajuan.

### F. Strategi Pembiayaan.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan seperti telah diuraikan di atas di dalam

pelaksanaannya di samping faktor manusia akan sangat tergantung kepada faktor pembiayaan. Karena adanya peningkatan sasaran/tujuan, jelas diperlukan peningkatan pembiayaan. Untuk memenuhi pembiayaan pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali tetap akan diusahakan terutama dari sumber yang berasal dari masyarakat/sektor swasta.

Kebijaksanaan yang ditempuh untuk meningkatkan sumber-sumber pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan asli Daerah Bali dengan jalan :
  - a. Intensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan yang telah ada.
  - b. Ekstensifikasi yaitu menggali sumber-sumber pendapatan yang baru.
  - c. Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar menyerahkan sumber-sumber pendapatan baru kepada Daerah Propinsi Daerah Tk. I Bali, untuk lebih mendorong terciptanya otonomi yang riil dan bertanggungjawab. di Daerah.
2. Proyek-proyek besar yang sangat mendesak dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
3. Meningkatkan peranan sektor Perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya di dalam pembiayaan pembangunan Daerah.
4. Menciptakan iklim yang sehat untuk kelancaran berusaha dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat/sektor swasta di dalam pembangunan Propinsi Daerah Tk. I Bali melalui Penanaman Modal.
5. Subsidi/ganjaran dari Pemerintah Pusat.
6. Bantuan/sumbangan dari Luar Negeri yang sifatnya tidak mengikat baik berasal dari sektor Pemerintah, maupun lembaga-lembaga Internasional lainnya dalam rangka mempercepat pembangunan Daerah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP.**

#### **A. Pelaksanaan.**

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ditetapkan oleh DPRD berupa Peraturan Daerah dan Pelaksanaan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Surat Keputusan.
2. Setiap lima tahun sekali, Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ini akan diperbaiki atau disusun kembali dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di segala bidang.
3. Program pelaksanaan kebijaksanaan serta usaha pembangunan untuk setiap tahun dituangkan dalam rencana operasional dalam bentuk APBD.

#### **B. Persyaratan.**

Berhasilnya rencana pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali tergantung pada kondisi sosial-ekonomi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali serta partisipasi seluruh masyarakat, baik di tingkat Daerah maupun di tingkat Nasional.

Berhasilnya pembangunan Daerah berarti berhasilnya pula pembangunan Nasional, sehingga pelaksanaan pembangunan harus disertai dengan tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin seluruh rakyat terutama sekali tekad, semangat, ketaatan dan disiplin seluruh aparat pelaksana.